

Implementasi Pendekatan Symbio-City pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus Slums Upgrading di Kota Yogyakarta

Agus Salim^{1*}, Siti Nursanti Irriani² dan Yunita Rahmi Hapsari³

¹ Perencana Ahli Muda, Bappeda Pemerintah Kota Yogyakarta

² Kepala Sub-Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Pemerintah Kota Yogyakarta

³ Kepala Seksi Penataan Infrastruktur Permukiman, Dinas PUPKP Pemerintah Kota Yogyakarta

Korespondensi: *agussalimbalkot@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.114> | halaman: 241 - 269

Dikirim: 24-02-2022 | Diterima: 30-07-2022 | Dipublikasikan: 31-07-2022

Abstrak

Partisipasi warga dalam pembangunan telah lama menjadi permasalahan. Meski telah diakomodasi dalam proses pembangunan, kelompok rentan mungkin masih belum diperhatikan. Untuk menghilangkan hal tersebut, perhatian khusus perlu diberikan dengan memanfaatkan pendekatan inklusif dalam proses pembangunan. Makalah ini menggunakan pendekatan yang disebut Symbio-City untuk membuat proses pembangunan lebih inklusif, dengan mengambil proyek peningkatan daerah kumuh sebagai kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa alat pendekatan relevan, sekitar setengahnya telah dimasukkan ke dalam proyek. Belajar dari keseluruhan proses, pendekatan Symbio-City tampaknya efektif tetapi mahal. Menerapkannya pada skala proyek mengharuskan pengguna untuk memilih beberapa alat yang relevan dengan proyek tertentu dan meninggalkan alat 'tidak relevan' lainnya. Namun, pendekatan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam skala yang lebih besar, seperti dalam program yang terdiri dari beberapa proyek. Hasilnya kemudian dapat diakumulasikan untuk digunakan dalam berbagai program/proyek di masa depan dengan beberapa modifikasi.

Kata kunci: kelompok rentan; pembangunan kota inklusif; Symbio-City; perbaikan daerah kumuh; Kota Yogyakarta.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah lama menjadi *isu* penting dan telah terakomodasi baik dalam regulasi maupun praktik di lapangan. Sistem perencanaan pembangunan Nasional sendiri, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mensyaratkan adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan. Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara umum serta pembangunan ekonomi lokal secara khusus juga mengalami intensifikasi. Lebih jauh lagi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan juga mensyaratkan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarpras maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, sebagian masyarakat belum tentu mendapatkan akses secara setara. Dalam Musrenbang di tingkat kelurahan misalkan, partisipasi dalam pelaksanaan tentu dilakukan secara berjenjang. Penduduk dengan jumlah diatas 1.000 di tiap kelurahan tidak mungkin diundang secara keseluruhan saat acara Musrenbang, melainkan perwakilan. Dalam konsepnya yang ideal, musyawarah-musyawarah skala kecil untuk merumuskan usulan pembangunan diperlukan agar seluas mungkin masyarakat terlibat. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dibawa oleh perwakilan masing-masing ke Musrenbang kelurahan. Dalam praktiknya, konsep berjenjang tersebut tidak selalu terjadi, tergantung pada masing-masing pemimpin komunitas atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini berarti belum tentu setiap orang mendapatkan akses untuk mengusulkan sesuatu berdasarkan kebutuhannya atau sesuatu yang dianggap penting.

Persoalan partisipasi tidak hanya berhenti pada pemberian kesempatan, namun juga apakah semua orang bisa dan mampu mengakses kesempatan tersebut. Dalam konteks ini, di antara lapisan dan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kelompok rentan. Kerentanan sebagaimana didefinisikan dalam UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction* (2009) adalah "karakteristik atau keadaan suatu komunitas, sistem atau aset yang mudah terdampak akibat bahaya". Sedangkan kelompok rentan, sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Cakupan kelompok rentan ini sesungguhnya sangat beragam dan bervariasi di berbagai negara sebagaimana diuraikan oleh (Kuran, 2020) yang juga memasukan kelompok minoritas, perempuan secara umum, berpendidikan rendah, *migrant* ilegal, penyandang disabilitas secara luas termasuk yang menderita penyakit kronis, dan kelompok yang terstigma (negatif). Dalam konteks partisipasi dalam pembangunan, masih terdapat tanda tanya besar; apakah kelompok rentan tersebut telah secara setara mendapatkan akses dalam pembangunan? Kelompok rentan pada tingkat tertentu juga memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga peran serta mereka dari awal perumusan masalah sampai akhirnya menikmati hasil pembangunan seharusnya mendapatkan perhatian.

1.2. Masalah Kekumuhan dan Upaya Penanganannya: Kebijakan Eksisting

Salah satu *case* pembangunan, khususnya terkait layanan publik yang penting untuk diangkat adalah penanganan kumuh. Dalam konteks yang lebih luas, kekumuhan merupakan salah satu masalah klasik pembangunan di perkotaan. Kombinasi dari arus urbanisasi, keterbatasan pekerjaan dengan upah layak, keterbatasan lahan dan harga tanah yang tidak

terjangkau menyebabkan berkembangnya *informal housing*, sebagian diantaranya dalam kondisi kumuh (Soto, 1989). Dalam konteks Yogyakarta, dan mungkin juga beberapa kota lain di Indonesia, *informality* justru menjadi karakter pembangunan perumahan, dimana rumah-rumah warga sudah *settle* terlebih dahulu dengan basis administrasi informal Roekoen Tetangga (RT) sebelum adanya pengaturan resmi oleh negara (Raharjo, 2010), sebagian diantaranya tidak atau kurang layak huni dengan lokasi terbanyak di pinggir sungai. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagian titik kumuh di Kota Yogyakarta juga teridentifikasi di pinggir tiga sungai yang melintasi Kota Yogyakarta, yaitu Winongo, Code dan Gajahwong.

Slums di Kota Yogyakarta mungkin tidak se-kumuh *slums* di tempat lain, misalkan *Kijiji* di Nairobi yang huniannya terbuat dari tanah liat, *Joypad Patti* di Mumbai yang terbuat dari rumput dan bambu, atau *Favela* di Rio de Janeiro yang dikendalikan oleh preman, sebagaimana ditunjukkan oleh (Neuwirth, 2005). Disamping ilegal, *slums* seperti dicontohkan di beberapa negara tersebut hampir tanpa akses air bersih, pipa pembuangan, sanitasi dan toilet yang layak. Model/pendekatan yang akan digunakan untuk penanganan *slums* akan berbeda dari satu lokasi ke lokasi yang lain, tergantung pada Intensitas kekumuhan serta tingkat permasalahannya. Berdasarkan penilaian terhadap aspek dan intensitas ke-kumuhan-nya, secara umum kondisi di Kota Yogyakarta termasuk dalam klasifikasi permukiman kumuh ringan. Ada dua alternatif penanganan yang dapat dilakukan, yaitu dengan (1) pemugaran (jika berada pada lahan legal atau jelas alas haknya) dan (2) permukiman kembali (jika berada pada lahan ilegal atau tidak jelas alas haknya). Pemugaran adalah perbaikan atau pembangunan kembali perumahan untuk menjadi layak huni, sedangkan pemukiman kembali adalah upaya untuk memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi kumuh ke tempat lain karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipugar karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 11 disebutkan bahwa garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Berdasarkan pada peraturan ini, pemerintah melakukan penataan permukiman kumuh di sepanjang sungai melalui skema pemugaran. Pemugaran yang dilakukan adalah dengan memundurkan rumah-rumah yang berada di pinggir sungai sehingga tercipta jarak 3 meter dari sungai, dan membuat rumah rumah tersebut menghadap ke sungai. Ruang yang tercipta antara sungai dan rumah-rumah yang ada dimanfaatkan sebagai jalan lingkungan yang terhubung dengan jalan utama sehingga dapat digunakan untuk akses kendaraan darurat seperti mobil ambulan ataupun truk pemadam kebakaran. Selanjutnya, di bawah jalan lingkungan tersebut dibuat sarana pengelolaan air limbah domestik, sehingga limbah cair yang berasal dari rumah tangga di sekitar lokasi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Selain itu, dengan membuat rumah-rumah yang berada di pinggir sungai menghadap ke sungai akan membuat sungai sebagai halaman depan sehingga warga yang tinggal akan memelihara kebersihan sungai.

Untuk melakukan pemugaran permukiman kumuh yang bersifat kompleks seperti contoh di atas, tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi saja, namun diperlukan kerja sama beberapa instansi yang berkaitan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kota/ kabupaten. Penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di sepanjang sungai di Kota Yogyakarta merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penanganan terhadap rumah-rumah terdampak yang ada di pinggir sungai tersebut, pemerintah pusat membangun sarana dan prasarana permukiman yang

diperlukan dan Badan Pertanahan Nasional memberikan legalitas terhadap hak atas tanah pada rumah-rumah yang telah ditata. Selain itu, terdapat juga *spot* permukiman kumuh yang terletak di dalam kawasan permukiman (bukan bantaran sungai). *Spot* tersebut tersebar secara sporadis sehingga jika dinilai hanya memenuhi dua atau tiga indikator kekumuhan sehingga upaya penataannya dilakukan dengan cara yang berbeda, baik dilaksanakan oleh OPD-OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan program-program dan dana-dana yang langsung ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, penanganannya tidak selalu bertajuk penanganan kumuh, namun bisa berupa skema perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan saluran air limbah (SAL), dan sebagainya.

Selanjutnya, penanganan kumuh ringan dengan skala lingkungan dan kebutuhan penanganan yang tidak kompleks bisa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, *framework* intervensi yang diimplementasikan adalah dengan skema kota tanpa kumuh (Kotaku). Sebagaimana disampaikan oleh (Pratama, 2020), Kotaku menangani kekumuhan berdasarkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang diimplementasikan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan sembari memperkuat kelembagaan daerah untuk memastikan pembangunan yang mandiri, berkelanjutan dan berpihak pada kelompok miskin. Di Kota Yogyakarta, pendekatan penanganan permukiman kumuh seperti ini telah diterapkan sejak Tahun 2015, dimana tim Kotaku mengimplementasikan rencana dengan basis data lokasi berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh.

Penanganan permukiman kumuh secara partisipatif diawali dengan mengajak masyarakat untuk menemukenali lingkungannya, yaitu menemukan masalah dan potensi yang ada di wilayah permukiman mereka dan menemukan solusi berdasarkan permasalahan dan potensi tersebut. Permasalahan khususnya yang berkaitan dengan sarana prasarana dasar permukiman yaitu: pengelolaan limbah rumah tangga, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, jalan lingkungan, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran serta keteraturan bangunan. Selanjutnya masyarakat membuat prioritas penanganan dan diwujudkan dalam suatu perencanaan. Hasil perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat ini dikonsultasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta serta Kementerian PUPR. Setelah mendapatkan persetujuan, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan mengutamakan padat karya, yaitu menggunakan tenaga kerja dari wilayah bersangkutan. Dalam keseluruhan proses pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini, masyarakat didampingi oleh Tim KOTAKU dan dibina oleh Dinas PUPKP serta Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY.

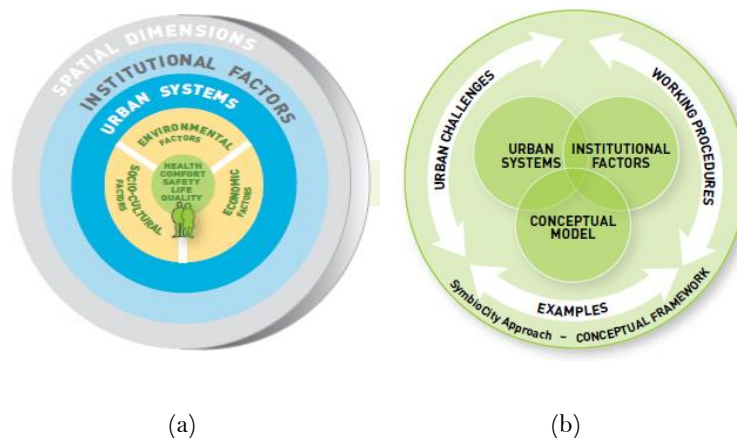
1.3. Symbio-City sebagai Alternatif Intervensi Kebijakan

Dengan demikian, pelaksanaan *slums upgrading* sejauh ini sudah melibatkan masyarakat, terutama warga terdampak. Namun, kembali pada latar belakang masalah diatas, bagaimana dengan isu partisipasi kelompok rentan dan aksesibilitas terhadap proses dan hasil pembangunan? Apakah perencanaan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas pada lingkungan yang terdampak telah secara eksplisit dilakukan? Apakah yang menjadi kebutuhan dan *concern* berbagai kelompok masyarakat, termasuk dan lebih khusus di dalamnya kelompok rentan sudah terakomodir dengan baik pada kegiatan yang sudah berjalan? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut tentu membutuhkan evaluasi hasil dari berbagai intervensi penanganan kumuh yang sudah dijalankan. Senyampang dengan hal itu, pada Tahun 2021 ini 5

Kelurahan di Kota Yogyakarta mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Australia dan USAID untuk melaksanakan program *slum-upgrading* yang fokus pada isu *Water and Sanitation* dimana bentuk intervensinya mensyaratkan adanya suatu pendekatan inklusif. Pada saat yang sama, tim penulis yang juga tengah mengikuti *Training Executive Symbio-City* untuk pembangunan kota yang holistik dan inklusif, membutuhkan lokasi sebagai *case study* sehingga dengan adanya 2 hal tersebut terbentuk kolaborasi yang tepat bersama tim Kotaku untuk mewujudkan *slums-upgrading* inklusif. Mendasarkan pada hal tersebut, *paper* ini akan lebih mengeksplorasi hasil dari kolaborasi tersebut dengan *framework Symbio-City* daripada mengevaluasi hasil dari intervensi *slums-upgrading* yang sudah ada.

Symbio-City merupakan suatu model pendekatan holistik dan terintegrasi untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan pengalaman beberapa daerah di Swedia dan beberapa negara berkembang di dunia. Pendekatan ini menawarkan metode untuk mengkomunikasikan ragam kemungkinan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan baik dari sudut pandang perencanaan perkotaan maupun pembangunan dengan mengintegrasikan aspek multidimensi, multifungsi dan multi-*stakeholder* yang diterjemahkan ke dalam aspek spasial, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, sistem perkotaan dan institusi/kelembagaan dalam kerangka yang saling mendukung dan sinergi. (Ranhagen, 2012) menyampaikan bahwa di antara stakeholder tersebut, masyarakat perkotaan sebagai elemen terpenting, terutama masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Dengan kata lain, kelompok marginal mendapatkan tempat dalam pendekatan ini. Menggunakan proses serta cara berpikir dan bekerja yang mengandalkan fleksibilitas, bukan berdasarkan prosedur yang tetap (*fix procedure*) memungkinkan pendekatan ini dapat diterapkan di mana saja dan untuk berbagai tujuan dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Meskipun ada beberapa langkah yang ditempuh, proses bisa berulang (*iterative*) dan saling menguatkan antar tahapan. Keberulangan dimungkinkan untuk mendorong cara berpikir yang lebih holistik sebelum menentukan solusi dan bentuk intervensi, dan menekankan pada pentingnya sinergitas antar unsur/dimensi. Salah satu orientasinya adalah untuk mendukung transformasi yang progresif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (*livelihoods*) masyarakat. Sebagai suatu konsep, kerangka kerja yang digunakan *Symbio-City* lebih bertujuan memberikan masukan serta melengkapi (bukan menggantikan) aturan, kebijakan maupun panduan yang sudah ada dengan mengedepankan aspek holistik dan terintegrasi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

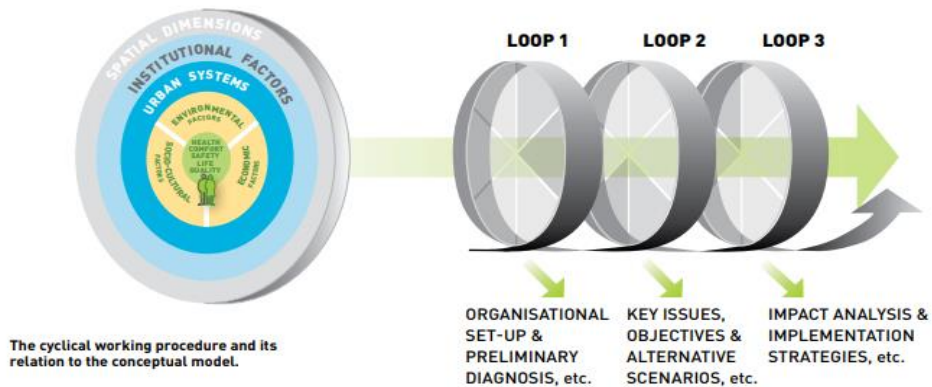
Secara lebih rinci, pendekatan *Symbio-City* dapat dijelaskan dengan Gambar 1. Gambar 1.a merupakan model konseptual *Symbio-City* dimana aspek kesehatan (*health*), kenyamanan (*comfort*), keamanan (*safety*) dan kualitas hidup masyarakat (*life quality*) menjadi pusat/intinya. Aspek-aspek tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*environment factors*), sosial budaya (*socio-cultural factors*) dan ekonomi (*economic factors*) pada lapis kedua. Keberhasilan pencapaian tujuan tidak lepas dari -sebagaimana ditunjukkan pada layer selanjutnya secara berturut-turut- adanya dukungan sistem perkotaan (*urban system*), faktor kelembagaan (*institutional factors*) dan dimensi keruangan (*spatial dimensions*). Selanjutnya, sebagai pembentuk *framework* konseptual (ditunjukkan pada Gambar 1.b), faktor kelembagaan dan dimensi keruangan merupakan dua elemen yang dikombinasi dengan elemen ketiga, yaitu model konseptual setiap case yang hendak dipecahkannya.



Gambar 1. (a) Model konseptual *Symbio-City*; (b) kerangka kerja proses pendekatan *Symbio-City*

Sumber: SKL *International*, 2012

Langkah kerja *Symbio-City* terdiri dari 6 tahapan. **Pertama**, menyusun proses kerja/ mengorganisir proses. Tahap ini seluruh stakeholder yang terlibat diidentifikasi. **Kedua**, analisis kondisi eksisting untuk melihat akar permasalahan secara holistik, meliputi aspek spasial, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, sistem pelayanan perkotaan, dan institusi. Masing-masing aspek memiliki alat analisis, diantaranya meliputi analisis stakeholder, SWOT, sistem perkotaan, dan analisis kelembagaan. Keseluruhan analisis bertujuan untuk menetapkan prioritas isu serta alternatif solusi yang menjadi fokus pada tahap selanjutnya, yaitu **ketiga**. Tahap ini merupakan identifikasi isu penting yang sudah dianalisis pada tahap sebelumnya untuk kemudian menetapkan tujuan jangka panjang. Alat analisis yang bisa digunakan diantaranya *Grid analysis*, *Force Field Analysis (FFA)* dan *Logical Framework Analysis (LFA)* yang didalamnya juga memuat *problem tree analysis*. Tujuan jangka panjang yang ditetapkan sebaiknya memenuhi kualifikasi; (a) memberi arah dan menjadi panduan, (b) cukup *feasible* untuk dicapai, (c) terintegrasi sehingga terdapat sinergi antara tujuan dan sistem, (d) nyata dan dapat dikomunikasikan dengan pihak lain, dan (e) menimbulkan inspirasi untuk meningkatkan komitmen. Langkah **keempat** adalah menyusun proposal alternatif yang memuat dan mempertimbangkan visi, potensi, dan kesempatan/*opportunity*. Proposal yang disusun harus mampu mengakomodir sinergi antar sistem perkotaan dan keberlanjutannya dapat terjaga. Tahap **kelima** adalah melakukan penilaian dampak terhadap proposal yang telah disusun dan **keenam** adalah menyusun strategi implementasi. Semua proses/ tahapan tersebut tidak harus dilakukan secara linear, melainkan bisa bolak-balik atau *iterative* sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Skema Proses Iterative dalam *Symbio-City*

Sumber: SKL *International*, 2012

1.4. Tujuan

Berdasarkan eksplorasi persoalan pembangunan inklusif, skema *slums upgrading* dan uraian tentang pendekatan *Symbio-City* di atas, analisis yang dituangkan dalam paper ini bertujuan untuk membagikan temuan studi lapangan. Studi yang dimaksud adalah mengujicobakan pendekatan *Symbio-City* pada intervensi *slums upgrading* di Kota Yogyakarta. Uji coba tersebut sendiri merupakan upaya untuk menjawab 3 permasalahan berikut ini;

1. Sejauh mana pendekatan *Symbio-City* dapat menjawab kebutuhan *slums upgrading* yang inklusif?
2. Bagian analisis mana yang relevan dan tidak relevan dari *Symbio-City* dalam konteks *slums upgrading* tersebut?
3. Hal lain apa yang menjadi pelajaran (*lesson learnt*) dari penerapan *Symbio-City* pada *slums upgrading* dan intervensi pembangunan secara lebih umum?

Selanjutnya yang juga menjadi penekanan dalam *paper* ini adalah belum tuntasnya uji-coba yang dilakukan karena proses *training* dan pelaksanaan fisik *slum upgrading* yang belum selesai dilakukan. Namun demikian, hasil sementara yang telah ditemukan sudah cukup untuk menjadi *prototype* sebuah model pembangunan inklusif yang dengan segala kelebihan dan kelemahannya bisa direplikasi di tempat lain dengan kondisi tertentu. Lebih detail tentang latar belakang dan bagaimana uji coba tersebut dilakukan diuraikan dalam pembahasan konteks, data dan metode berikut ini.

1.5. Konteks, Data dan Metode

Penyusunan *paper* ini berawal dari keterlibatan tim penulis dalam *Training Executive Symbio-City* untuk pembangunan kota yang holistik dan inklusif. Pelatihan yang diselenggarakan oleh *International Center for Local Democracy (ICLD)* Swedia tersebut terdiri dari rangkaian workshop; *Inception Part*, *Follow-Up Workshop*, *Team Visit*, *Swedish Workshop*, dan *Final Workshop*, dengan kurun waktu Maret 2021 - Februari 2022. Di antara rangkaian *workshop* tersebut, peserta mendapatkan tugas *challenge project* berupa *case study* atau studi lapangan. Tim penulis sepakat untuk mengangkat tema *slums-upgrading* sebagai fokus, yang hasilnya juga dituangkan dalam *paper* kebijakan ini. Namun konteksnya adalah ketika proses penyusunan *paper*, *training* masih *on-going process* sehingga apa yang dituliskan adalah hasil sementara dari bagian analisis yang sudah

berjalan sembari memproyeksi keseluruhan gambaran penerapan pendekatan *Symbio-City* dalam studi lapangan.

Karena pendekatan *Symbio-City* terdiri dari banyak elemen, data yang digunakan juga beragam, mulai dari profil kota yang datanya diambil dari publikasi BPS serta dokumen perencanaan pembangunan yang relevan, sampai pengambilan data secara langsung di lapangan. Pengambilan data secara langsung diantaranya adalah dengan rapat koordinasi dan wawancara dengan stakeholder, serta diskusi kelompok terfokus pada warga yang lingkungannya akan dilaksanakan proyek *slums-upgrading*. Rangkaian *workshop* dengan kombinasi *step-by-step* tersebut mengkondisikan penulis untuk melakukan pencarian dan olah data secara bertahap dan bahkan merevisi proses yang sebelumnya telah selesai dilakukan jika diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan *Symbio-City* bukan merupakan *framework* kaku yang mesti dijalankan secara urut dan sistematis, melainkan fleksibel menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam melakukan olah data dan analisis, penulis secara tim banyak melakukan diskusi *brainstorming*, *sharing* data lapangan dan perspektif sesuai tugas profesional dan keahlian masing-masing untuk kemudian dituangkan dan di *update* dalam *file* yang sudah diset untuk bisa di *sharing* dan dikerjakan secara simultan bersama-sama menggunakan aplikasi *Google doc*.

Hasil yang tertuang dalam paper ini disusun dalam beberapa pembahasan. Workshop *Symbio-City* dan analisis-*analisis* yang dilaksanakan akan menjadi pembahasan pertama untuk melihat konteks sekaligus cakupan analisis yang dilakukan, deskriptif dan hampir bersifat kronologis, mengikuti proses dari Workshop ke Workshop, sekaligus urut tahapan langkah-langkah *Symbio-City*. Kedua, berbagai alat analisis atau tools yang telah digunakan selama Workshop tersebut beserta hasilnya dianalisis berdasarkan lingkup isu, apakah pada tingkat komunitas sebagai lokus intervensi, atau pada skala yang lebih luas. Perbedaan ini penting untuk mengidentifikasi beberapa tools yang relevan, dan beberapa tools lain yang kurang atau bahkan tidak relevan secara langsung dalam konteks *slums upgrading*. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menentukan bagaimana sebaiknya menggunakan pendekatan *Symbio-City* ini untuk *slums upgrading* secara khusus, dan intervensi-intervensi pembangunan secara lebih umum. Dalam hal ini, pendekatan *Symbio-City* secara konseptual memiliki cakupan yang lebih luas dibanding keperluan untuk intervensi pembangunan secara inklusif, karena di dalamnya juga termuat isu-isu sustainability yang mungkin tidak semuanya diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan inklusif. Bagaimana pendekatan *Symbio-City* diposisikan akan coba disampaikan di bagian akhir.

II. Hasil dan Diskusi

2.1. Workshop *Symbio-City* dan Analisis untuk *Slums-Upgrading* Inklusif

Rangkaian workshop *Symbio-City* sebagaimana disampaikan dalam uraian ***Konteks, Data dan Metode*** memiliki timeline sampai awal tahun 2022. Saat paper ini disusun, Juli 2021, praktis acara dan juga latihan dan analisis yang menyertainya belum selesai. Workshop yang sudah terselenggara adalah Inception workshop I dan II, serta Follow-Up Workshop I dan II. Dari 6 tahapan analisis sebagaimana diuraikan dalam ***Symbio-City sebagai Alternatif Kebijakan***, baru tahap 1 sampai 3 yang sudah terpecahkan. Berikut ini diuraikan proses penyelesaian masing-masing tahap dalam *frame* 4 workshop dan tugas lapangan/homework diantara masing-masing workshop tersebut.

2.1.1. Inception Workshop

Inception workshop dilakukan dua kali. Workshop I benar-benar merupakan pengenalan awal dari *Symbio-City*. Pendekatan *Symbio-City*, sebagaimana diuraikan di atas, dieksplorasi beserta contoh-contoh praktiknya. Selanjutnya, latihan pertama yang dilakukan terkait dengan analisis spasial dan gender, dimana 3 spot ruang terbuka, terdiri dari 2 ruas jalan dan 1 Embung, diobservasi. 2 ruas jalan tersebut dianalisis peruntukan apa saja dan siapa yang menggunakan. Embung sebagai fasilitas publik dilihat siapa pemanfaat berdasarkan pemilahan gender dan kelompok usia, serta untuk apa. Masuk pada tahapan analisis *Symbio-City*, penyusunan proses kerja/ mengorganisir proses (tahap pertama) mulai diperkenalkan. Pengorganisasian project dilakukan dengan *mapping* organisasi, menentukan kelompok kerja (*working group*) dan tim pengarah (*steering group*), *mapping* stakeholder dan menganalisis kaitannya dengan kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Latihan selanjutnya adalah analisis situasi eksisting di tingkat kota (tahap kedua). Hal ini penting dilakukan untuk lebih memahami konteks, mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan menemukan solusi yang holistik atas tantangan (*challenges*) yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan menggunakan *tools* SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*). Sebagaimana dijelaskan dalam Diagram 1a. Di atas, faktor yang dipertimbangkan dalam analisis adalah lingkungan, ekonomi, sosial budaya, sistem perkotaan, faktor kelembagaan dan dimensi keruangan. SWOT dilakukan mencakup 3 dari 6 faktor yang disebutkan tersebut, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya yang menjadi tugas lapangan setelah workshop/ sebagai homework adalah review dan mematangkan penyusunan kelompok kerja dan kelompok pengarah, serta mematangkan analisis SWOT tingkat kota, ditambah analisis SWOT pada proyek slums upgrading sebagai case study.

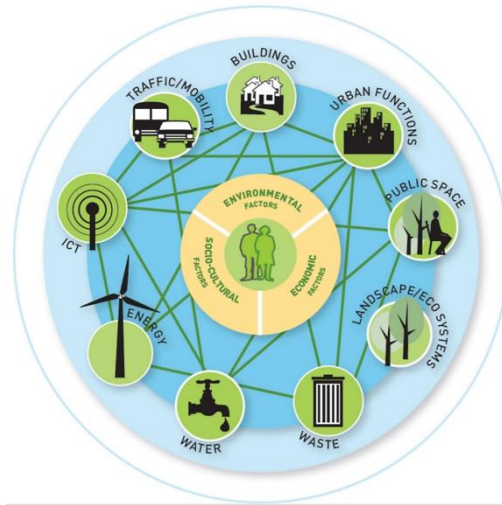
Setelah melalui proses penyelesaian analisis SWOT tingkat kota dan case study selama 4 Minggu, Workshop kembali diselenggarakan untuk Inception II. Setelah refreshing materi sebelumnya dan tugas yang telah diselesaikan, analisis situasi kembali dilanjutkan. 3 faktor yang belum tercover dalam analisis SWOT, adalah sistem perkotaan, faktor kelembagaan dan dimensi keruangan. Workshop kali ini fokus pada dimensi keruangan dan sistem perkotaan. Dimensi keruangan mempertimbangkan bentuk area terbangun (*built area*) ruang kota sekaligus sebagai cara memahami dimensi perkotaan lainnya. Dalam hal ini, analisis keruangan lebih fokus pada case study, tidak secara luas seluruh kota. Dalam konteks tim Yogyakarta, analisis dibatasi pada tingkat kecamatan. Pemetaan dilakukan pada 4 fokus; pola guna lahan (*land use patterns*), SWOT keruangan (*spatial SWOT*), dimensi sosial (*social dimension*), dan terkait tema case study (*city challenge thematic mapping*). Latihan pola guna lahan dilakukan dengan cara mewarnai bagian peta secara berbeda berdasarkan peruntukannya; perumahan (*housing*), tempat kerja (*work places*), area perbelanjaan (*shopping areas*), pelayanan kota (*municipal services*), area taman dan rekreasi (*park and recreation areas*), air (*water*), dan rute transportasi utama (*main transportation routes*). SWOT keruangan memilih 3 aspek relevan paling penting dari matrik hasil analisis SWOT sebelumnya, untuk diidentifikasi 3 aset/ kekuatan dan kesempatan kunci, 3 tantangan, serta bagaimana pola pertumbuhan kota terjadi. Dimensi sosial fokus pada isu perbedaan tingkat pendapatan, jenis settlement yang ditinggali, apakah informal dan apakah kumuh? termasuk status kepemilikan lahan, aksesibilitas suatu area terhadap sekolah dan klinik/ pusat kesehatan, menemukenali hambatan (*barriers*) yang menyebabkan segregasi, dan mengidentifikasi area yang tidak aman. Pada fokus keempat, yaitu terkait tema yang dipilih, Tim Yogyakarta melakukan analisis SWOT keruangan pada area case study, termasuk memasukan faktor kerawanan bencana, khususnya banjir, dan penyebabnya.

Sementara itu, analisis sistem perkotaan memasukan 9 elemen perkotaan; lalu lintas (*traffic/ mobility*), bangunan (*building*), fungsi perkotaan (*urban functions*), ruang terbuka (*public*

space), *landscape/ecosystem*, limbah/sampah (waste), air, energy, serta teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. **Fungsi perkotaan** meliputi pembangunan permukiman, produksi industrial, layanan komersial, budaya dan rekreasi, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya.
2. **Bangunan** disorot terkait desain dan arsitektur, adaptasinya terhadap iklim mikro, kondisi tanah dan sekitar bangunan, serta sistem lalu lintas dan area hijau baik dalam bangunan maupun lingkungan sekitar (mengukur seberapa energi efisien gedung tersebut didesain).
3. **Perencanaan lanskap** memasukan pengadaan ruang terbuka yang atraktif didalam dan sekitar kota, persebaran taman dan koridor hijau, penghijauan jalan dan ruang terbuka (ekosistem yang robust mnyumbang mitigasi perubahan iklim, memperkuat biodiversitas ekologi, serta menyediakan fasilitas aktivitas rekreatif dan sosial).
4. **Ruang publik** merupakan seluruh ruang non-privat di lanskap perkotaan yang aksesibel dan dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan.
5. **ICT** mencakup sistem tiket terintegrasi, penggunaan dalam monitoring dan surveilans untuk meningkatkan keamanan dan menemukan masalah, serta sebagai informasi dan komunikasi publik.
6. Elemen **limbah** menekankan pada pengelolaan yang bijak dan efisien dimana aspek dan kapasitas organisasi, operasional, teknis dan keuangan dipertimbangkan.
7. **Air dan Sanitasi** mempertimbangkan aspek lokasi titik pengumpulan dan koneksi, area sistem sanitasi, variasi penggunaan tipe air, meminimalisir penggunaan air portable, konservasi air, fungsi saluran air limbah, polusi air tanah, kesehatan dan higienitas, aspek sosial budaya dan keterjangkauan (*affordability*).
8. Sektor **Energi** memasukan produksi, distribusi dan penggunaannya untuk bermacam tujuan, supply yang aman secara lingkungan dari sumber terbarui, efisiensi penggunaannya pada seluruh tingkat, termasuk perencanaan kota, desain gedung, proses produksi, sistem transportasi, kendaraan, peralatan, sistem monitoring dan gaya hidup.
9. **Lalu-lintas** mencakup sistem mobilitas yang berbeda-beda di berbagai tingkatan wilayah, dengan sistem transit terintegrasi, manajemen dan operasi seluruh infrastruktur moda transportasi (jalur pedestrian, sepeda, bus, jalan, rel kereta dan jalur transportasi air)

Antar elemen tersebut kemudian diidentifikasi pola hubungannya. Dalam hal ini *Symbio-City* mendorong proses review dan perencanaan yang mempertimbangkan potensi sinergi antar elemen sistem perkotaan. Dalam hal ini, sinergi dimaknai adanya integrasi mutualistik yang ramah lingkungan, menghemat sumber daya alam dan finansial. Contoh sederhana adalah sampah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangkit energi. Contoh lainnya adalah penggunaan lahan tidak terpakai untuk ditanami sayuran. Integrasi mutualistik tersebut juga dipetakan kontribusinya kedalam aspek-aspek lingkungan, sosial budaya atau ekonomi, sebagaimana digambarkan Gambar 3 dibawah ini. Identifikasi sistem perkotaan dilakukan untuk menemukan; (1) sinergi eksisting, (2) potensi sinergi yang belum eksis, dan (3) menggambarkan bagaimana sinergi tersebut dilakukan.



Gambar 3. Sistem Perkotaan dan Sinergi Antar Elemen

Sumber: SKL International, 2012

Selanjutnya, Workshop kedua ini juga memperkenalkan indeks kota berkelanjutan. Indeks tersebut mengukur seberapa sustainable suatu kota relatif dibanding kota-kota lainnya di dunia. 3 pilar yang digunakan indeks tersebut sesuai dengan pendekatan *Symbio-City*, yaitu *people = social*, *planet = environment*, dan *profit = economic*. 16 Indikator dipakai, masing-masing masuk kedalam 1 di antara pilar tersebut. Indikator dalam dimensi ekonomi meliputi Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development), serta Posisi Koneksi Wilayah (Regional Positions and Connections). Dimensi Lingkungan mencakup indikator Ruang terbuka Hijau dan Hutan (Urban Greenery and Forest), Air (Blue Spaces), Kontaminasi dan Polusi (Contamination and Pollution), Mobilitas, Sampah, Energi, serta Manajemen Bencana (Risk and Disaster Management). Sedangkan indikator dimensi Sosial meliputi Inklusi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Distribusi Pendapatan, dan Ruang Publik. Sebagai latihan tools ini dipakai untuk mengukur tingkat sustainability kota masing-masing peserta. Hasilnya kemudian dimasukkan kedalam template diagram spider dan menunjukkan posisi relatif masing-masing Kota terhadap rata-rata sustainability kota di dunia.

2.1.2. Workshop Follow-Up

Workshop Follow-up juga diselenggarakan dua kali. Workshop Follow-Up I atau Workshop ke-3 menyetujui beberapa isu yang relevan. Dua diantaranya adalah demokrasi lokal dan jasa ekosistem. Demokrasi di tingkat pemerintah lokal (Kabupaten/ Kota) dengan prinsip kesamaan (*equity*), partisipasi, transparansi dan akuntabilitas diperkenalkan. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan untuk melihat case study masing-masing; isu mana yang terkait?, kelompok mana yang akan terdampak?, siapa yang berpartisipasi?, bagaimana akuntabilitas diperoleh?, serta seberapa perlu inovasi dalam penggunaan ruang publik diperlukan?. Lebih lanjut, jasa ekosistem (*ecosystem service*) juga menjadi tools relevan, yang dimaknai sebagai manfaat yang didapat dari ekosistem. Ada 4 kelompok fungsi jasa ekosistem perkotaan, yaitu *provisioning*, *regulating*, *cultural* dan *supporting*. Produksi pangan, air segar, bahan baku/ material dan energi masuk dalam kategori *provisioning*. Fungsi *regulating* terdapat pada proses pemurnian udara dan air, pengurangan kebisingan (pohon-pohonan berdaun rimbun), perlindungan dari cuaca buruk, adaptasi iklim dan proses polinasi yang dilakukan serangga. Sedangkan fungsi budaya memasukan kesehatan (dengan aktivitas olahraga), rekreasi, interaksi

sosial, pendidikan, simbolisme dan spiritualitas. Fungsi pendukung atau supporting diambil oleh biodiversitas, keseimbangan ekologis, formasi tanah, dan habitat.

Masuk lagi dalam *Symbio-City*, tahap ketiga, yaitu menemukenali isu penting/key issues dan menetapkan tujuan, memperkenalkan cara memformulasi visi. Visi yang dimaksud merupakan bayangan masa depan yang menjadi rumusan bersama, mungkin untuk dicapai dan berjangka panjang. Rumusan visi perlu memperhitungkan sumber daya dan keinginan dan terdapat rasa memiliki (*sense of ownership*) dari stakeholder. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pemimpin yang menginspirasi dan kapabel, serta mengkomunikasikannya pada pihak internal maupun eksternal merupakan hal yang penting. Visi yang baik adalah yang menggambarkan masa depan secara positif dan jelas, berbeda dari kondisi saat ini tapi sangat mungkin dicapai, untuk jangka waktu 20-30 tahun, serta selaras dengan nilai dan budaya masyarakat lokal. Tools relevan yang diperkenalkan adalah GRID analysis, yaitu untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan kota di masa depan. Tools sederhana tersebut berbentuk matriks 4 kolom, dengan heading **Have** dan **Do Not Have** di sebelah kiri dan **Do Not Want** dan **Want** di atas. Dalam brainstorming, partisipan perlu mengidentifikasi (1) permasalahan atau apa yang mereka punya tapi tidak diinginkan (Have/Do Not Want), (2) potensi/ aset atau apa yang mereka punyai dan inginkan (Have/ Want), (3) potensi masalah yang perlu dihindari atau (Do Not Have/Do not Want), dan (4) cita-cita/mimpi atau apa yang tidak dipunyai dan diinginkan (Do Not Have/Want). GRID analisis ini selain berguna untuk menemukenali potensi dan masalah, poin (1) - (3), poin (4) merupakan bahan untuk merumuskan visi jangka panjang. Visi yang akan dirumuskan tersebut tentu perlu mempertimbangkan poin (1) - (3).

Untuk mendukung proses yang inklusif, beragam stakeholder dilibatkan dalam proyek perubahan yang menggunakan pendekatan *Symbio-City*. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, stakeholder yang sangat penting adalah masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Masyarakat bukanlah suatu entitas tunggal, melainkan terdiri dari bermacam kelompok, termasuk didalamnya kelompok-kelompok rentan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat (*community participation*) dibutuhkan untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dan dialog terdiri dari 4 tingkat; (1) untuk menyampaikan informasi, (2) sebagai sarana konsultasi atau meminta masukan/ pendapat, (3) untuk mencari alternatif pemecahan masalah, dan (4) untuk memecahkan masalah. Teknik yang dipakai juga tidak semata-mata diskusi, melainkan dengan menggunakan media tertentu. Salah satu contoh adalah dengan menyediakan pilihan-pilihan dalam bentuk matriks, dan partisipan diminta untuk menandai dengan spidol **titik merah** sebagai relevan menggambarkan kondisi saat ini, dan **titik biru** sebagai harapan dimasa depan pada masing-masing kolom pilihan. Kolom dengan titik merah lebih banyak mewakili kondisi saat ini, misalkan kondisi pusat kota dengan banyak mobil pribadi, lalu lintas padat dan menjemukan (*boring*). Sebaliknya, kolom dengan banyak titik biru menggambarkan harapan agar nantinya pusat kota menjadi lebih banyak sepeda, tempat menyenangkan (*pleasure*), dan rekreasi. Teknik yang lain adalah dengan menandai titik di peta dengan warna **merah** sebagai tempat yang masih butuh dan dapat ditingkatkan, dan **hijau** sebagai tempat yang dianggap sudah bagus. Teknik ini dikombinasikan dengan menyampaikan argumen atau penjelasan jika tanda yang diberikan merah, bagaimana atau dengan cara apa tempat tersebut bisa ditingkatkan. Selanjutnya, teknik bicara sambil berjalan diawali dialog dengan politisi atau pejabat pemerintah, kemudian berjalan, berhenti pada suatu titik dan berjalan lagi seterusnya. Di setiap titik perhentian, peserta mengisi pada template yang disediakan tentang apa yang bagus dan apa yang masih perlu ditingkatkan dari elemen perkotaan. Cara ini juga bisa dilakukan dengan bersepeda tergantung jarak, jenis medan atau tujuan khusus tertentu. Cara

yang lebih ekstensif adalah dengan melakukan survei melalui web atau pertemuan khusus dengan kelompok audience yang representatif.

Diantara workshop, baik dari Workshop I ke II, dari Workshop II ke III, dan setelah Workshop III ini, Tim Yogyakarta (selanjutnya disebut Tim) banyak melakukan komunikasi dengan Kotaku. Pertama, Tim mengundang Kotaku ke Bappeda untuk diseminasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dijadikan basis penyelenggaraan pembangunan inklusif. Tim juga memperkenalkan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PPHPD) dan Forum Kecamatan Inklusi (FKI). Dua jenis *ad-hoc* tersebut merupakan 'alat bantu' untuk mengimplementasikan Perda 4/2019. Setiap Kecamatan memiliki 1 FKI, namun dalam konteks rencana intervensi Kotaku 2021 di 4 kecamatan, 4 FKI yang dilibatkan. Dalam hal ini, baik Kotaku dan 4 FKI tersebut memiliki kesamaan isu, yaitu mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kemudian, Tim juga dilibatkan dalam beberapa koordinasi perencanaan proyek slums upgrading Kotaku untuk memberi masukan-masukan yang relevan. Diantara pertemuan-pertemuan resmi tersebut, koordinasi juga dilakukan secara daring, termasuk melalui grup komunikasi daring *Slums Upgrading Inklusif* antara Tim, Kotaku dan FKI.

Setelah Workshop III, Tim memilih satu diantara lokus slums Upgrading Kotaku untuk lebih dalam melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana urgensi dan tekniknya dijelaskan di atas. Lokasi yang dipilih adalah di Kelurahan Baciro, Gondokusuman. Lokus intervensi Kotaku ada pada 4 RT dalam lingkup 2 RW, dimana yang dipilih adalah 3 RT dalam 1 RW agar lebih fokus. Harapannya, hasil dari partisipasi tersebut bisa memberi masukan pada 1 RT lainnya di Kelurahan baciro, dan lebih luas lagi pada lokus intervensi Kotaku di tempat lain. Persiapan dilakukan, termasuk dengan tetap mengkomunikasikan dengan Kotaku, berkoordinasi dengan Lurah Baciro dan melibatkan FKI Gondokusuman. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), dengan melibatkan keterwakilan kelompok rentan di masing-masing RT (Perempuan, Anak, Lansia, Miskin dan penyandang Disabilitas). Teknik yang dipakai adalah; (1) Community Mapping, dan (2) GRID Analisis. Community Mapping dilakukan dengan bantuan Peta wilayah beberapa RT dimana peserta bisa menandai fasilitas-fasilitas publik di area tersebut, serta spot-spot yang dibutuhkan dan atau perlu dikembangkan lebih lanjut. GRID Analysis digunakan untuk mengolah lebih lanjut dari temuan pada Community Mapping dan mengerucutkannya dalam formulasi visi komunitas. Hasilnya kemudian menjadi masukan bagi Kotaku yang diintegrasikan dalam Slums Upgrading. Dalam konteks training, hasil tersebut juga disharing pada Workshop selanjutnya, yaitu Workshop Follow-up II/Workshop IV.

Workshop IV ini memperkenalkan Logical Framework Analysis (LFA) dengan tujuan menyediakan informasi yang jelas, ringkas dan sistematis terkait project dalam suatu kerangka kerja. LFA menghubungkan (secara logis) antara *goals*, *objectives*, aktivitas, hasil (results) dan indikator dari suatu project yang mengarah pada *outcomes* yang diharapkan. 9 langkah dalam LFA terdiri dari; (1) analisis konteks, (2) analisis stakeholder, (3) analisis pohon masalah, (4) analisis objective, (5) rencana aktivitas, (6) perencanaan sumber daya, (7) indikator dan alat verifikasi, (8) analisis dan manajemen resiko, dan (9) analisis asumsi. Masing-masing langkah tersebut masuk dalam 3 aspek; (a) relevansi (1-3), fisibilitas (4-6), dan keberlanjutan (7-9).

Analisis konteks mencakup gambaran yang jelas terhadap lingkungan dan faktor eksternal. Analisis yang umum dipakai adalah SWOT. Analisis stakeholder membagi stakeholder berdasarkan perannya; (1) Beneficiaries/ Target Group, (2) Implementers, (3) Decision Makers dan (4) Financers, dimana satu stakeholder sangat mungkin memiliki lebih dari satu peran. Mapping stakeholder dilakukan berdasarkan kriteria tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence). Analisis stakeholder menghasilkan 4 kategori; (1) *Regular Minimal*

Contact jika influence dan interest rendah, (2) **Keep Completely Informed** jika interest tinggi tapi influence rendah, (3) **Anticipate and Meet Needs** jika interest rendah tapi influence tinggi, dan (4) **Manage Most Thoroughly** jika baik interest dan influence tinggi. Sementara itu, langkah ke-3, yaitu analisis masalah dengan alat analisis pohon masalah. Kriteria masalah pokok yang diurai harus; (1) bertolak dari kurangnya kapasitas organisasi, (2) dalam jangkauan pemecahan tim, (3) dapat diselesaikan dalam kurun waktu berlangsungnya project, dan (4) merupakan statement negatif, bukan *Missing Solution*. Dalam analisis pohon, masalah pokok merupakan bagian batang pohon. Satu masalah pokok ini ditelusuri beberapa penyebab atau akar masalahnya, dan dicari beberapa masalah lanjutan yang menjadi efek atau dahan pohon tersebut. Penyebab masalah merupakan akar atau alasan yang menyebabkan masalah pokok tersebut terjadi, sedangkan efek masalah menjangkau masalah-masalah lain yang mungkin akan timbul dimasa depan jika tidak dipecahkan.

Setelah pohon masalah, LFA ke-4 adalah pohon objective, yang merupakan *mirroring* dari pohon masalah. Disini masalah pokok ditransformasi menjadi objective pokok, penyebab masalah menjadi goal jangka pendek dan efek masalah menjadi visi atau impact. Pohon objective menghasilkan rumusan tujuan dari proyek, visi/outcome/impact yang hendak dicapai, dan beberapa output jangka pendek untuk mencapai outcome tersebut. Beberapa output jangka pendek ini kemudian diuraikan kedalam rencana aktivitas sebagai LFA ke-5. Setiap output memiliki 1 atau lebih aktivitas untuk mencapainya. Kemudian, setelah aktivitas direncanakan, sumber daya, sebagai LFA ke-6, juga perlu mendapat perhatian. Faktor yang perlu diperhatikan diantaranya; keahlian teknis, perlengkapan, pendanaan, alokasi waktu, tempat penyelenggaraan dan alat digital.

Sebagaimana dijelaskan di awal, antara tujuan yang hendak dicapai dan aktivitas yang dijalankan harus terhubung secara logis. Lalu, bagaimana untuk memastikannya? LFA ke-7 menyediakan tools tersebut, yaitu indikator dan alat verifikasi. Dalam hal ini, keberhasilan suatu tujuan harus dapat diukur. Meningkatkan jumlah dialog dengan masyarakat, misalkan, bisa diukur dengan jumlah dialog yang diselenggarakan. 'Meningkatkan' memiliki arti menambah dari yang sudah ada, sehingga jika tadinya ada 10 kali dialog, menambah berarti menjadikannya lebih dari 10 kali. 10 kali dialog tersebut menjadi **baseline**, sedangkan tujuan untuk meningkatkan jumlah dialog memerlukan **target** tertentu yang harus dicapai, misalkan menjadi 15 kali dialog. Pada kasus yang berbeda, baseline bisa jadi 0 jika memang merupakan suatu tujuan dan atau aktivitas baru. Sementara itu, pada kasus yang berbeda lagi, baseline juga bisa ditetapkan dalam bentuk persentase, sehingga target juga secara konsisten mengikuti dalam bentuk persentase. Aktivitas-aktivitas yang telah dirumuskan tersebut juga perlu dilihat resiko masing-masing elemen yang mungkin mengurangi efektivitas atau bahkan mengarah ke kegagalan. 2 tolok ukur yang dipakai, yaitu *likely* kemungkinan terjadi dan *severity* atau keparahan yang diakibatkan. Penilaian resiko menggunakan skala likert 1-5. Setiap elemen diestimasi skalanya, kemudian poin *likely* dikalikan poin *severity* dan menghasilkan importance, dengan nilai tertinggi 25 (5 x 5). Semakin tinggi nilai yang didapat pada suatu elemen, semakin tinggi resiko kegagalannya. Elemen dana tidak dialokasikan, misalkan, bisa jadi mencapai skor 25, sehingga perlu plan B. Dalam hal ini, plan B merupakan action yang harus ditempuh untuk mengatasi resiko tersebut. Semua elemen yang diassessment perlu dirumuskan action untuk mengatasi resiko tersebut. Langkah LFA terakhir adalah analisis asumsi atau masalah penting yang perlu diselesaikan pihak lain.

2.2. Analisis Berdasarkan Tingkat/Scope

Melalui 4 Workshop dan interaksi di lapangan tersebut, Bagaimana wujud *Symbio-City* ketika diimplementasi sudah mulai jelas. Meskipun baru sebagian dari tahapan *Symbio-City* dilakukan, karakteristik pendekatan ini sudah bisa 'dibaca' untuk diproyeksikan potensinya dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Tercatat baru 3 dari 6 tahapan yang telah dilakukan, yaitu (1) mengorganisir proses, (2) analisis kondisi, dan (3) identifikasi isu penting dan tujuan. Namun dalam 3 tahap inilah analisis-analisis banyak dilakukan. 3 tahap yang tersisa akan disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada 3 tahap sebelumnya, yaitu (1) proposal alternatif, (2) penilaian dampak, dan (3) strategi implementasi. Jika dikaitkan dengan case study dilapangan, yaitu intervensi slums upgrading, beberapa analisis bisa dikaitkan langsung, namun lebih banyak yang tidak langsung. Isu yang coba kami ketengahkan disini terkait *scope* analisis, dimana project slums upgrading biasanya dilakukan di beberapa titik dengan basis unit wilayah Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Sedangkan analisis yang telah dilakukan kebanyakan di tingkat wilayah yang lebih luas, sebagian tingkat kota dan sebagian lainnya tingkat sub-kota. Hanya beberapa analisis yang langsung terkait dengan lokus case study. Analisis pada tingkat yang lebih luas tersebut tentu masih relevan. Namun dalam hal ini, analisis dengan tingkat wilayah yang lebih luas punya potensi yang lebih banyak, salah satunya yaitu sebagai basis intervensi project-project yang berbeda. Namun terlepas dari itu, timbul pertanyaan lain, apakah pendekatan *Symbio-City* ini memang seharusnya lebih tepat diimplementasikan di tingkat Kota, alih-alih di tingkat komunitas atau RW? Pertanyaan ini akan dieksplor pada pembahasan selanjutnya. Namun sebelum itu, penting untuk memetakan jenis analisis mana saja yang basisnya tingkat Kota dan tingkat Sub-Kota atau wilayah yang lebih kecil, yaitu tingkat komunitas.

Dari pembahasan sebelumnya, 3 tahap *Symbio-City* yang sudah dikerjakan terdiri dari beberapa analisis dengan menggunakan alat analisis yang berbeda-beda. Tahap mengorganisasi proses (tahap I), alat yang dipakai adalah mapping stakeholder. Pada analisis situasi (tahap II), Alat analisis yang dipakai adalah SWOT aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Alat lain yang juga digunakan untuk analisis situasi adalah Land use pattern, spatial SWOT, dimensi sosial, sistem perkotaan, jasa ekosistem dan indeks kota berkelanjutan yang divisualisasi dalam diagram Spider. kemudian tools dalam analisis tahap III meliputi analisis GRID, partisipasi masyarakat dan analisis Logical Framework. Tidak semua analisis dilakukan di tingkat komunitas tempat case study. Beberapa memang perlu dilakukan di tingkat Kota untuk mengidentifikasi konteks yang lebih luas, sedangkan beberapa lainnya karena basis data yang tersedia hanya di tingkat Kota. Karena dasar pijak kajian ini adalah pada penerapan pendekatan *Symbio-City* pada slums upgrading di tingkat komunitas, analisis tingkat komunitas terlebih dahulu dieksplor, selanjutnya baru analisis di tingkat yang lebih luas, yaitu Kota.

2.2.1. Analisis Tingkat Komunitas

Analisis yang langsung terkait dengan komunitas dan lingkungan tempat case study diantaranya adalah SWOT tingkat Komunitas, analisis dimensi keruangan, yang meliputi Pola Guna Lahan dan SWOT keruangan (spatial), analisis dimensi sosial, jasa ekosistem, analisis GRID, partisipasi masyarakat dan logical framework. Analisis SWOT di tingkat komunitas memerlukan peran stakeholder lokal yang sudah familiar dengan permasalahan lokal. Demikian juga dengan SWOT spasial, dimana analisisnya akan lebih komprehensif jika orang-orang lokal dilibatkan dalam pembahasannya. Bedanya kedua jenis SWOT tersebut adalah jika SWOT tingkat komunitas mencakup aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi; SWOT spasial mengkhhususkan pada isu-isu keruangan, misalkan kepadatan penduduk, tata guna lahan, hijauan dan sejenisnya. Isu-isu tersebut tentu juga masuk dalam salah satu aspek dalam SWOT tingkat

komunitas, terutama pada aspek lingkungan, sehingga disini nampak adanya overlapping isu. Kedua jenis SWOT tersebut masing-masing dilakukan di tingkat komunitas. Bedanya adalah SWOT aspek lingkungan, sosial dan ekonomi perlu konteks yang lebih luas untuk membantu memahami secara lebih komprehensif sekaligus membantu menempatkan posisi suatu komunitas dalam konteks perkotaan secara lebih luas, sehingga analisis tingkat Kota diperlukan. Sedangkan analisis SWOT keruangan tidak terlalu krusial untuk dilakukan di tingkat Kota.

Analisis dimensi sosial sebagai bagian dari analisis situasi juga penting dilakukan di tingkat komunitas untuk melihat isu spesifik di wilayah terkait. Diantara isu tersebut mencakup kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan sebagainya. Sama halnya dengan analisis SWOT, analisis dimensi sosial juga memerlukan konteks yang lebih luas, yaitu analisis sosial di tingkat kota. Alasannya sama, yaitu perlunya memposisikan permasalahan di tingkat lokal dalam konteks Kota. Disamping itu, dan yang lebih penting secara praktis, data isu sosial di tingkat komunitas sangat terbatas sehingga perlu dilengkapi dengan data dan analisis tingkat Kota. Penyediaan data dalam konteks lokal komunitas sebenarnya masih memungkinkan, yaitu dengan pengambilan data primer. Namun, tentu saja hal ini memerlukan waktu, tenaga dan -yang terpenting- biaya. Analisis tingkat komunitas lain yang memiliki karakter sama adalah jasa ekosistem, dimana aspek atau elemen yang relevan di komunitas tersebut saja yang dimasukkan. Dalam aspek provisioning misalkan, elemen food production tidak terdapat dalam lokasi case study. Namun demikian, hampir seluruh elemen lain relevan untuk dianalisis. Analisis ini perlu dilengkapi dengan analisis tingkat yang lebih luas karena masih relevan dalam konteks kehidupan dan mobilitas aktivitas penduduk lokal yang tentu saja tidak hanya sebatas pada komunitasnya sendiri, melainkan di seluruh wilayah perkotaan.

Sedangkan 4 analisis lain, yaitu dimensi keruangan yang terdiri dari pola guna lahan dan SWOT keruangan, GRID, partisipasi masyarakat dan logical framework merupakan analisis yang hanya perlu dilakukan di tingkat komunitas. Hal ini bukan berarti bahwa analisis di tingkat kota tidak perlu dilakukan. Analisis tersebut tetap bisa dilakukan meskipun relevansinya mungkin tidak akan signifikan dalam menunjang keberhasilan project.

Analisis GRID dilakukan untuk membantu masyarakat di lokasi project memahami potensi dan permasalahan di lingkungannya, sekaligus memformulasikan visi di tingkat komunitas. Visi di tingkat Kota tentu saja sudah terformulasi secara resmi pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, formulasi visi perlu melibatkan stakeholder yang secara representatif mewakili berbagai kelompok masyarakat, sehingga fokus pada tingkat komunitas saja akan jauh lebih efisien tanpa mengurangi efektivitasnya. Tabel 1. diatas merupakan pemetaan potensi masalah dan mimpi masyarakat di lokasi case study sebagai hasil dari FGD yang penulis lakukan selama studi ini.

Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan beberapa tools pelibatan masyarakat untuk mengidentifikasi isu atau masalah dan potensi yang dimiliki sekaligus alternatif-alternatif solusi yang bisa ditempuh. Dalam konteks slums upgrading inklusif, mengenali titik-titik ruang yang banyak digunakan aktivitas warga atau spot-spot rawan bahaya dan bencana adalah dua contoh relevan. Tingkat analisisnya tentu hanya relevan dilakukan di tingkat komunitas atau scope project dilaksanakan. Analisis framework logis juga demikian, relevansinya hanya dilakukan di lingkup project yang akan dilakukan. Analisis ini memuat langsung identifikasi masalah, alternatif solusi dan rencana yang akan dilakukan dalam project, sehingga scope nya hanya relevan dilakukan di tingkat komunitas tempat project tersebut dilakukan.

Tabel 1. Analisis GRID di Wilayah Case Study Slums Upgrading Inklusif

| | DON'T WANT | WANT |
|-------------------|--|---|
| HAVE | <ol style="list-style-type: none"> 1. banjir 2. Bangunan kepadatan tinggi 3. Rumah dihuni lebih dari satu rumah tangga 4. Pernikahan dini 5. Lingkungan bising 6. Kesenjangan sosial 7. Fasilitas publik yang timpang antar wilayah (RT) 8. Rumah tidak berpenghuni 9. Fasilitas publik yang kurang (misal wifi) untuk mendukung sekolah online (karena Pandemi) 10. Parkir ilegal di bahu jalan 11. Jalan/ Gang sempit 12. Bau limbah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses universal terhadap seluruh fasilitas publik (diantaranya Masjid, Gereja, Toilet Umum, dan Pasar Tradisional) 2. Toilet umum yang layak 3. Bebas banjir 4. Sistem sanitasi yang layak |
| DON'T HAVE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Videotron yang menempel pada fasilitas umum 2. Transmisi radio komunitas 3. Polisi tidur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih banyak ruang publik yang aksesibel untuk semua 2. Distribusi ruang publik yang merata antar wilayah 3. Akses terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas secara mencukupi 4. Rambu lalu lintas di jalan untuk meminimalisir kecelakaan 5. Fasilitas dan lingkungan yang lebih kondusif untuk mendukung belajar secara online |

Sumber: FGD *Symbio-City* untuk Slums Upgrading di Baciro, Gondokusuman, 2021, Diolah

2.2.2. Analisis Tingkat Kota

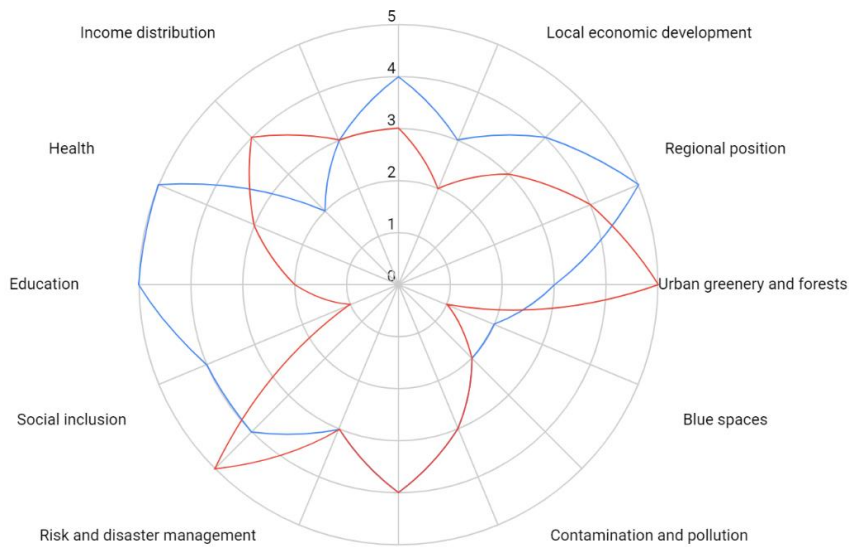
Sementara itu, meskipun slums-upgrading yang dijadikan fokus case study berada pada lingkup komunitas, tepatnya beberapa RT pada tiap titik intervensi, beberapa analisis *Symbio-City* juga dilakukan dalam scope yang lebih luas, yaitu Kota. Tiga diantaranya adalah sistem perkotaan, diagram spider dan analisis faktor kelembagaan.

Analisis sistem perkotaan yang menggabungkan 9 elemen perkotaan sebagaimana diuraikan pembahasan sebelumnya, dinilai performance dan sustainabilitasnya. Pertama-tama, setiap elemen diidentifikasi isu-isunya secara lebih spesifik. Elemen *Waste* misalkan, di *breakdown* lebih lanjut menjadi sampah dan limbah cair. Elemen fungsi perkotaan juga diurai lebih detail menjadi; (1) permukiman, (2) industri dan komersial, (3) jasa, budaya dan rekreasi, serta (4) pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya. Masing-masing sub-elemen tersebut kemudian diidentifikasi indikator yang relevan dan dilengkapi dengan data yang tersedia sesuai indikator tersebut. Berdasarkan data-data sebagai indikator tersebut, penilaian *performance* perlu dilakukan,

dengan memberikan *emoticon* 😊 sebagai indikasi memuaskan, 😐 cukup memuaskan, dan 😞 kurang memuaskan. Selanjutnya, setiap elemen atau sub-elemen atau data setiap indikator jika suatu elemen/ sub-elemen terdiri dari lebih 1 indikator, dinilai relevansi aspek sustainabilitasnya. Aspek sustainabilitas juga diurai ke dalam 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Elemen air, misalkan, dibagi menjadi air pipa dan non pipa. Aspek sustainabilitasnya hanya relevan dengan lingkungan untuk air pipa, sedangkan air non pipa tidak ada yang relevan karena masih menggunakan sumur sehingga dianggap tidak sustainable dari aspek manapun. Contoh lainnya adalah elemen limbah, tepatnya sub-elemen sampah, dimana relevansi sustainabilitasnya hanya pada aspek ekonomi (dengan adanya bank sampah), dan sosial (dengan manajemen berbasis komunitas). Pengelolaan sampah tidak sustainable pada aspek lingkungan karena masih didominasi open dumping. (Untuk informasi lebih detail tentang analisis sistem perkotaan, lihat lampiran).

Lebih lanjut, hasil dari analisis performance dan relevansi sustainabilitas tersebut basis untuk analisis sinergi, yaitu bentuk keterkaitan antara satu elemen dengan elemen perkotaan lainnya (lihat Diagram 3). Tidak semua elemen saling terkait dan sebagian elemen memiliki banyak keterkaitan dengan elemen lainnya. Analisis yang kompleks seperti ini penting untuk dilakukan di tingkat kota, karena meskipun di tingkat komunitas banyak elemen yang relevan, data indikator masing-masing menjadi sesuatu yang sulit disediakan di tingkat lokal komunitas. Disamping itu, Sistem perkotaan terdiri dari elemen-elemen yang terkait yang perlu dipotret secara holistik sehingga diupayakan seminimal mungkin hal yang mungkin akan terlewatkan. Relevansi penggunaan ditingkat lokasi slums upgrading adalah dengan mengambil poin-poin yang relevan dengan kondisi lokal.

Sementara itu, diagram spider (diagram 4) juga merupakan alat untuk mengukur tingkat keberlanjutan (*sustainability*) kota. Namun berbeda dengan analisis sistem perkotaan, diagram ini mengukur indeks keberlanjutan kota dengan membandingkan dengan indeks keberlanjutan kota-kota lain di dunia. Aspek yang dinilai juga beririsan, meliputi *people* yang mewakili aspek ekonomi, *planet* mewakili lingkungan, dan *profit* mewakili ekonomi. Elemen yang dinilai berjumlah 18 sebagaimana diulas sebelumnya. Penilaian yang dilakukan juga sesuai dengan data yang ada mewakili masing-masing indikator tiap elemen. Tidak seperti analisis sistem perkotaan, penilaian dilakukan dengan memakai skala likert 1-5. Seperti halnya analisis sistem perkotaan dan dengan alasan yang sama, analisis tingkat sustainabilitas kota ini juga relevan dilakukan di tingkat Kota. Aplikasi di tingkat komunitas adalah dengan mengambilnya sebagai referensi. Hasilnya adalah sebagaimana digambarkan dalam Grafik 1. berikut ini (grafik warna biru). Kota Yogyakarta unggul terutama dalam (1) posisi regional, (2) kesehatan dan (3) pendidikan (masing-masing skor 5), dan kurang dalam hal (1) ketimpangan pendapatan, (2) ruang biru serta (3) polusi dan kontaminasi (masing-masing skor 1). Perhatikan juga perbandingannya dengan indeks rata-rata (grafik warna merah), dimana skor 8 elemen sustainabilitas Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata.



Gambar 4. Diagram Spider, Tingkat Sustainability Kota Yogyakarta

Sumber: Olahan penulis

Analisis faktor kelembagaan (institutional) sebagai bagian analisis situasi berupaya *capture* perubahan-perubahan yang terjadi di perkotaan. Beberapa elemen perkotaan yang mengalami perubahan dibanding beberapa tahun sebelumnya perlu diidentifikasi dan dimasukkan. Beberapa contoh, yang merupakan hasil analisis penulis, mencakup transportasi umum, kendaraan bermotor (pribadi), tanah pertanian, obyek wisata, akomodasi pendukung wisata dan pendidikan, ruang publik, lembaga pendidikan tinggi termasuk biaya pendidikannya, dan pasar termasuk pengelolaan berbasis franchise. Perubahan dari masing-masing elemen tersebut kemudian diidentifikasi. Transportasi umum, misalkan, mengalami proses pergeseran tren, dimana sebelumnya dominan perusahaan-perusahaan swasta, menjadi dominan dimiliki pemerintah. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi juga mengalami peningkatan secara pesat. Alasan terjadinya proses perubahan tersebut juga disebutkan, misalkan berkurangnya lahan pertanian disebabkan pembangunan hotel yang pesat. Selanjutnya, dua faktor kelembagaan, yaitu yang memudahkan terjadi (*enabling*) dan merupakan faktor yang menyulitkan (*hindering*), juga perlu ditelusuri. Setiap elemen bisa mengandung dua faktor sekaligus, tapi ada juga yang hanya salah satu faktor. Ruang publik yang berubah semakin layak dan disebabkan oleh faktor *city branding* dan memperindah kota memiliki 1 faktor *enabling*, yaitu adanya perencanaan ruang dan kebijakan pembangunan yang mendukung. Contoh yang hanya memiliki faktor *hindering* adalah biaya pendidikan tinggi yang mengalami kenaikan signifikan sekaligus semakin tumbuh-berkembangnya kampus-kampus swasta disebabkan adanya perubahan regulasi perguruan tinggi yang menjadi Badan Hukum Milik Pemerintah (BHMN) yang lebih otonom dalam pendanaan. Sementara itu, pasar yang semakin modern memiliki faktor *enabling* sekaligus *hindering*. Faktor *enabling* pada aspek semakin menariknya kota Yogyakarta sebagai tujuan investasi. Sedangkan faktor *hindering*nya adalah adanya faktor pelanggaran kebijakan di tingkat provinsi, dimana sebelumnya pendirian pasar modern dibatasi secara ketat untuk melindungi pasar tradisional. Analisis faktor kelembagaan ini juga tentunya relevan dilakukan di tingkat Kota saja, oleh karena

aspek kelembagaan yang berpotensi memiliki pengaruh setidaknya di tingkat kota sebagai basis otonomi pembangunan. Aplikasinya pada case study adalah juga sebagai referensi, dan jika bisa diantisipasi, elemen-elemen yang mengalami perubahan yang dipilih hanya yang relevan di lokasi case study.

Diluar tiga analisis tersebut, beberapa analisis lain juga dilakukan di tingkat kota, yaitu SWOT, Analisis Dimensi Sosial, dan Jasa Ekosistem. Tipikal alat analisis ini, seperti sudah disinggung sebelumnya, dilakukan juga di tingkat komunitas atau lokasi intervensi slums upgrading. Analisis di tingkat kota relevan untuk dilakukan karena dua alasan umum, yaitu (1) memberikan konteks yang lebih luas dan komprehensif, dan atau (2) data di tingkat lokal atau komunitas kurang tersedia. Aplikasinya dalam case study setidaknya sebagai referensi untuk memperkaya analisis dan tentu saja bahan yang harus dibagikan kepada stakeholder terkait yang akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diluar alat analisis diatas, satu tools yang relevan untuk disebutkan adalah analisis stakeholder. Jika beberapa analisis dilakukan di dua tingkat, kota dan komunitas secara tersendiri, analisis stakeholder ini dilakukan menggabungkan dua tingkat tersebut sekaligus. Bahkan lebih dari itu, karena identifikasi stakeholder pada slums upgrading juga meluas sampai ke scope wilayah provinsi dan bahkan nasional, analisis stakeholder dilakukan secara multi-level dalam satu frame analisis.

2.3. Relevansi Penerapan Symbio-City

Slums upgrading, sebagaimana sekilas disinggung di awal, diorganisir pelaksanaannya oleh Kotaku. Sebagai suatu teamwork, tim tersebut memiliki 'cara kerja' yang berdasarkan regulasi dan konteks situasi di lapangan. Regulasi yang ada sudah mendorong pada upaya pelibatan stakeholder bahkan sampai tingkat lokal. Pemerintah kota sebagai bagian stakeholder bahkan memiliki peran sangat signifikan, dimana pemilihan lokus atau titik intervensi berdasarkan peraturan walikota tentang pemukiman kumuh, dan rencana-rencana pelaksanaan proyek yang lebih detail juga ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Peran Kotaku dalam hal ini, selain sebagai pelaksana adalah sebagai *bridging* antar stakeholder dimana didalamnya selain Pemerintah Kota, terdapat elemen stakeholder dari Pemerintah Provinsi, Pemerintahan tingkat Pusat, stakeholder lain, dan yang lebih penting yang di tingkat lokal/ komunitas.

Pelibatan stakeholder tingkat lokal biasanya diimplementasikan dengan menggandeng Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berada pada tingkat kelurahan. Disamping itu, ketua RT dan ketua RW tempat pelaksanaan proyek juga turut dilibatkan. Bahkan dalam kasus slums upgrading reguler, yaitu yang skema intervensinya menata permukiman pinggir/ area bantaran sungai, pelibatan tersebut mutlak dilakukan sejak awal sebagai pintu masuk untuk berkomunikasi dengan warga terdampak. Skema slums upgrading reguler tersebut adalah membantu masyarakat terdampak untuk menggeser bangunan rumahnya 3 meter kebelakang dari sungai, sekaligus nantinya untuk menghadapkan hunian tersebut ke sungai (sebelum ditata, umumnya membelakangi sungai). Ruang longgar 3 meter tersebut kemudian dibangun jalan kampung untuk akses masyarakat setempat sekaligus agar nantinya tidak ada bangunan liar lagi. Disamping pembangunan jalan tersebut, Kotaku juga membangun beberapa fasilitas lainnya, termasuk saluran limbah dan hydrant pemadam kebakaran.

Lalu bagaimana halnya dengan skema slums upgrading yang disyaratkan untuk dilaksanakan secara inklusif? Sebagaimana telah disinggung juga, fokus dari slums upgrading inklusif ini pada isu *water and sanitation*. Bagaimana aspek inklusivitas dari isu tersebut bisa digali? Yang pertama dan paling pokok tentu saja adalah air bersih dan sanitasi yang sehat harus bisa diakses semua warga. Bagi orang yang mampu, air dan sanitasi yang layak bukan persoalan sulit

untuk memperolehnya, namun bagaimana orang yang tidak mampu secara ekonomi? Jika air harus membeli, maka yang berdaya beli rendah akan kesulitan mengaksesnya. Demikian juga dengan sanitasi yang sehat, orang berdaya beli tinggi bisa dengan mudah menyediakan fasilitas tersebut. Namun bagaimana halnya bagi yang tidak mampu? Fasilitas tersebut perlu menjadi barang publik sehingga orang yang tidak mampu membangun sendiri bisa mendapatkan akses. Ketika fasilitas sanitasi menjadi publik, aksesibilitas orang-orang yang memiliki keterbatasan juga perlu diperhatikan. Mengingat bahwa fokus air dan sanitasi ini dalam konteks slums, dimana mayoritas merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), isu aksesibilitas tersebut menjadi permasalahan umum dalam komunitas. Sebagaimana yang juga telah disinggung pada bagian awal, kelompok rentan perlu mendapat perhatian utama ketika berbicara tentang pembangunan inklusif. Terkait hal ini, Kotaku juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip desain universal pada fasilitas-fasilitas publik yang perlu dibangun atau renovasi pada area slums upgrading.

Dalam situasi demikian, bagaimana peran pendekatan *Symbio-City* yang penulis ajukan? Bagi Kotaku, eksistensi penulis merepresentasikan Pemerintah Kota yang merupakan salah satu stakeholder, namun bisa jadi yang paling penting. Tim penulis berafiliasi pada Bappeda dan DPUPKP, dimana masing-masing memiliki peran pada penanganan kumuh, terutama dengan skema slums upgrading. Kotaku memiliki organisasi tersendiri untuk melaksanakan proyek slums upgrading. Tim penulis yang datang ditengah jalan menawarkan pendekatan *Symbio-City* juga menyusun organisasi pelaksana dan pengarah, dimana Kotaku merupakan satu diantaranya. Susunan organisasi pelaksana yang dimiliki masing-masing beririsan sangat erat, tapi organisasi pelaksana hasil latihan *Symbio-City* ini tentu saja tidak bisa diadopsi secara resmi oleh Kotaku karena mereka telah menyusun organisasinya terlebih dahulu, dan yang lebih penting, Kotaku merupakan organisasi otonom terlepas dari intervensi Pemerintah Kota. Dengan kondisi demikian, peran tim penulis menjadi semacam tim bayangan yang memberi masukan-masukan kepada Kotaku.

2.3.1. Jawaban untuk Kebutuhan Slums Upgrading Inklusif

Dengan titik tolak demikian, analisis-analisis dengan menggunakan pendekatan *Symbio-City* yang penulis olah tidaklah secara otomatis menjadi framework resmi yang diimplementasikan secara komprehensif, melainkan sebagai masukan salah satu stakeholder yang penting. Dalam konteks slums upgrading yang inklusif, Kotaku juga telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dua yang terpenting adalah pemerintah pusat dan penyandang dana. Penerapan universal design adalah salah satu contohnya.

Kemudian, sejauh mana pendekatan *Symbio-City* menjawab kebutuhan slums upgrading inklusif? Dilihat dari keseluruhan bangunan framework, pendekatan *Symbio-City* memiliki lingkup yang lebih luas dibanding yang dibutuhkan Slums-upgrading inklusif, baik dari lingkup isu maupun scope wilayah. Pendekatan *Symbio-City* terpusat pada manusia, yaitu untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan hidup yang berkualitas. Terdapat 3 faktor yang mendukung, yaitu lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Ketiga faktor tersebut didukung oleh sistem perkotaan yang berkelanjutan, faktor kelembagaan yang mendukung, serta yang tidak kalah penting adalah dimensi keruangan yang kondusif. Dalam konteks Slums Upgrading, pendekatan inklusif juga menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan yang dilibatkan dalam proses dan menikmati hasilnya sesuai aspirasi dan kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, semangat yang menyertai model pembangunan inklusif adalah tidak seorangpun tertinggal, termasuk kelompok yang paling rentan. Hal ini berarti bahwa isu kesehatan, kenyamanan, keamanan dan hidup berkualitas menjadi topik sentral juga. Namun yang

lebih dijadikan perhatian adalah bagaimana akses terhadap hasil pembangunan, termasuk yang mengarah pada 4 isu tersebut didapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Faktor sosial, ekonomi dan lingkungan tentu menjadi faktor penting juga dalam pembangunan inklusif. Namun tentu dalam realisasinya dalam suatu intervensi atau proyek pembangunan, satu faktor mungkin lebih ditonjolkan dibanding faktor lainnya tergantung jenis proyek tersebut. Dalam konteks slums upgrading, misalkan, faktor ekonomi meski masih menjadi perhatian, tapi tidak terlalu signifikan perannya. 3 komponen lain, sistem perkotaan, faktor kelembagaan dan dimensi keruangan yang masing-masing memuat banyak elemen juga secara umum menjadi alternatif jawaban slums upgrading inklusif, namun dalam prakteknya beberapa elemen yang memiliki peran menonjol dibanding beberapa elemen lain tergantung isu yang diangkat. Secara umum, salah satu karakteristik yang menonjol pada pendekatan *Symbio-City* namun tidak terlalu ditekankan dalam skema pembangunan inklusif adalah isu sustainability lingkungan. Tanpa mengurangi arti penting lingkungan yang sustainable, pembangunan inklusif lebih menonjolkan pada manusia, sehingga pembahasan tentang lingkungan tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas yang dalam dirinya harus sustainable dan manusia punya peran mewujudkannya, namun tetap terkait dan dikaitkan agar terwujud pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, *Symbio-City* secara umum bisa menjadi jawaban atas kebutuhan pembangunan yang inklusif.

Selanjutnya, dalam konteks slums upgrading yang menjadi pilot project, apakah pendekatan yang dibawa penulis kepada Kotaku dapat menjawab kebutuhan mereka untuk menyelenggarakan slums upgrading yang inklusif? Beberapa poin berikut merupakan masukan penulis yang memang diperlukan Kotaku;

1. Pelibatan stakeholder yang lebih luas

Meskipun project slums upgrading tengah berjalan dan stakeholder yang dilibatkan telah ditentukan, penulis menjelaskan tentang Perda 4/2019 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai framework, dan memperkenalkan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Forum Kecamatan Inklusi (FKI) sebagai organ pelaksanaan Perda tersebut di lapangan. Hasilnya, FKI di recognisi sebagai salah satu stakeholder yang memiliki peran. Stakeholder lain adalah penduduk lokal tempat project dilaksanakan. Kotaku masih cenderung melihat stakeholder masyarakat lokal sebagai satu entitas tunggal. Penulis memperkenalkan adanya beberapa kelompok rentan yang perlu secara khusus diperhatikan, diantaranya Perempuan, Anak, Lansia, Miskin dan Penyandang Disabilitas. Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan spesifik dan aspirasi yang bervariasi. Bahkan Kelompok Penyandang Disabilitas memiliki variasi sub-kelompok yang sangat beragam mewakili berbagai kebutuhan yang sangat spesifik, tergantung jenis dan tingkat Disabilitas masing-masing.

2. Analisis dimensi sosial

Sebagai bagian dari analisis situasi, analisis sosial menawarkan *insight* pada permasalahan sosial pada masyarakat. Beberapa diantaranya sangat erat terkait dengan isu inklusi, yaitu permasalahan kelompok rentan. Data pilah penduduk menurut jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) serta usia (Anak-anak, Usia Produktif dan Lanjut Usia), data dan permasalahan kelompok miskin serta penyandang disabilitas. Permasalahan lain yang juga disinggung terkait dengan isu pendidikan dan kesehatan. Pemaparan analisis dimensi sosial ini membantu memetakan permasalahan di lokus slums upgrading.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai tools dan teknologi. Tujuannya sebagaimana diuraikan sebelumnya juga bervariasi tingkatannya,

mulai dari menyampaikan masukan sampai membuat keputusan. Aktivitas pelibatan masyarakat ini penulis lakukan dengan melakukan *community mapping* di area project. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi spot-spot yang dianggap merah, atau masih perlu ditingkatkan/ bangun dengan lebih layak. Peserta yang dilibatkan juga beragam, diantaranya mencakup 5 kelompok rentan untuk melihat perspektif mereka terkait spot-spot penting dalam aktivitas sehari-hari yang mungkin berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Pendekatan partisipasi langsung seperti ini jarang dilakukan. Dalam konteks Kotaku, sebagaimana disebutkan, masyarakat lokal yang dilibatkan adalah ketua RT dan RW, disamping BKM sebagai agen pendukung dalam pelaksanaan project.

4. Analisis GRID

Dalam pendekatan *Symbio-City*, visi komunitas perlu dirumuskan. Visi atau mimpi tersebut merupakan proyeksi jangka panjang bersama dari komunitas yang saat ini mereka tinggali. Salah satu teknik yang dipakai adalah dengan menggunakan GRID, yang memetakan Have/ Do Not Have dan Want/ Do Not Want. Identifikasi apa yang mereka punya dan tidak mereka inginkan menjadi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Apa yang dimiliki dan diinginkan merupakan bentuk dari potensi atau aset yang ada dalam komunitas. Sedangkan apa yang tidak dimiliki dan tidak dipunyai adalah hal-hal yang mungkin akan menimbulkan permasalahan sehingga perlu diantisipasi atau dihindari. Terakhir apa yang tidak dipunyai tapi diinginkan menjadi suatu mimpi-mimpi yang selanjutnya diformulasikan sebagai visi jangka panjang komunitas. Analisis GRID ini, sebagaimana poin 3, menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Hanya bedanya, stakeholder yang dilibatkan tidak khusus kelompok rentan, melainkan ketua-ketua komunitas, diantaranya ketua RT dan RW. Bahkan dalam sesi itu juga terdapat pengurus FKI dan kelompok masyarakat lain.

Diluar 4 hal tersebut bukan berarti pendekatan *Symbio-City* tidak relevan untuk dipakai, melainkan justru karena telah ada overlap dari pendekatan eksisting yang digunakan oleh Kotaku. Analisis dimensi spasial, sistem perkotaan, dan logical framework analisis adalah beberapa diantaranya. Namun tentu beberapa diterapkan tidak seutuh dan lengkap dalam analisis *Symbio-City*. Analisis sistem perkotaan misalkan, *Symbio-City* melakukannya dengan sangat komprehensif mencakup 9 elemen perkotaan yang dipetakan berdasarkan nomenklatur sosial budaya, ekonomi dan lingkungan serta dengan diidentifikasi pola sinergi eksisting dan potensi sinerginya di masa depan. Dalam hal ini, banyak elemen yang tidak secara langsung terkait dengan isu yang diangkat dalam project slums upgrading inklusif. Air dan limbah, misalkan, adalah 2 elemen yang tentu dianalisis karena memang merupakan *core* dari intervensinya. Elemen-elemen lain mungkin sedikit beririsan atau bahkan tidak relevan sama sekali. Disamping itu, merumuskan sinergi eksisting maupun potensi sinergi antar elemen menjadi sesuatu yang tidak urgen dan merupakan kemewahan tersendiri untuk menganalisisnya. Lain halnya dengan analisis logical framework. Sebagai suatu project yang mesti terlihat hasilnya, setidaknya dalam jangka pendek, identifikasi masalah sampai merumuskan indikator keberhasilan perlu dilakukan. Meskipun belum tentu ke-9 langkah dalam analisis tersebut dipakai semua, setidaknya mayoritas dari langkah-langkah dalam analisis logical framework tersebut diadopsi. Terlepas dari *Symbio-City* alat analisis ini sesungguhnya telah sangat populer di Indonesia, sehingga adopsinya dalam suatu proyek menjadi hal umum. Analisis dimensi keruangan, sistem perkotaan dan logical framework merupakan beberapa contoh pendekatan *Symbio-City* yang juga digunakan Kotaku dalam proyek slums upgrading. Melihat dalam perspektif yang lebih luas tidak hanya terbatas proyek slums upgrading yang menjadi case study, Beberapa alat analisis lain juga masih relevan. Lebih jauh mengenai alat analisis yang relevan untuk slums upgrading inklusif diuraikan berikut ini.

2.3.2. Analisis Symbio-City yang Relevan

Untuk menjawab pertanyaan kedua, 'bagian analisis mana yang relevan dan tidak relevan dari *Symbio-City* dalam konteks slums upgrading', pemilahan scope analisis, yaitu tingkat komunitas dan kota perlu digunakan untuk mengurai. Disamping itu perlu dikenali juga alat analisis yang terkait langsung dengan isu slums upgrading inklusif di masing-masing tingkat. Tabel 2. berikut memetakan pemilahan jenis-jenis alat analisis yang dipergunakan dalam pendekatan *Symbio-City*. Setidaknya ada 8 tools yang dipakai dalam analisis tingkat komunitas/lingkup project, dan 7 tools lainnya di tingkat kota. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, beberapa alat analisis dipakai di dua level sekaligus, dalam hal ini setidaknya ada 3 alat analisis. Apakah semua relevan? Hal ini bisa dijawab dengan memilah lebih lanjut masing-masing scope menjadi terkait langsung atau tidak terkait langsung. Alat analisis yang terkait langsung memiliki kriteria bersinggungan langsung dengan (1) slums upgrading, (2) pembangunan inklusif, dan yang lebih penting (3) sebagai suatu project.

Hasilnya, hampir 50% alat analisis memiliki kaitan langsung, kebanyakan pada tingkat komunitas. Analisis dimensi keruangan dan sosial merupakan alat yang dapat memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan, dimana yang pertama lebih dekat kaitannya dengan slums upgrading dan yang kedua dengan isu inklusi. Hasil dari partisipasi masyarakat dengan berbagai metode pelaksanaannya dan analisis GRID yang juga dilakukan dengan partisipasi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana yang secara komprehensif dirumuskan melalui analisis logical framework. Sementara itu di tingkat Kota, analisis stakeholder sangat terkait dan bahkan ikut menentukan tingkat keberhasilan project. Sedangkan analisis dimensi sosial tingkat kota memiliki peran untuk melihat konteks yang lebih luas tapi penting terkait isu pembangunan inklusif. Alat analisis lain, baik dilakukan dalam scope komunitas maupun kota, tidak terkait langsung baik dengan slums upgrading, pembangunan inklusif maupun pelaksanaan project. Tools tersebut lebih dekat kaitannya dengan isu sustainabilitas pembangunan secara umum. Meski ini penting dan tidak berarti tidak dibutuhkan, keterkaitan langsung dengan project slums upgrading inklusif sangat tipis.

Tabel 2. Tingkat Relevansi Analisis *Symbio-City* Terhadap Slums Upgrading Inklusif Berdasarkan Scope dan Keterkaitan Langsung

| | Terkait | Tidak Terkait |
|--------------------------|--|---|
| Tingkat Komunitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Guna Lahan 2. SWOT Spasial 3. Dimensi Sosial 4. Partisipasi Masyarakat 5. GRID 6. Logical Framework | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perkotaan 2. Jasa Ekosistem |
| Tingkat Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder 2. Dimensi Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. SWOT tingkat Kota 2. Sistem Perkotaan 3. Tingkat Sustainabilitas/ Diagram Spider 4. Jasa Ekosistem 5. Analisis Kelembagaan |

Sumber: Olahan Penulis

2.4. Lesson Learnt

Sub-bahasan terakhir ini fokus untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa yang menjadi lesson learnt dari penerapan *Symbio-City* pada slums upgrading dan intervensi pembangunan secara lebih umum? 3 Tahap pertama dari keseluruhan tahapan dalam pendekatan *Symbio-City* secara urut adalah mengorganisir proses, analisis situasi atau kondisi eksisting dan identifikasi isu penting disertai penetapan tujuan jangka panjang. Diantara 3 tahapan tersebut, tahap kedua yang memiliki banyak alat analisis. persoalannya adalah jika diimplementasikan dalam suatu proyek slums upgrading inklusif, atau proyek-proyek pembangunan lain, apakah semua alat analisis perlu dipakai? Penulis dalam hal ini memahami bahwa alur tahapan *Symbio-City* tersebut diatur sedemikian rupa seutuh dan lengkap mungkin agar keputusan yang hendak diambil sudah cukup informasi dari banyak sisi. Muaranya adalah pada tahapan ke-3 dimana identifikasi isu-isu prioritas dan penentuan tujuan jangka panjang sebagai basis menyusun proposal.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, banyak tools yang tidak hanya fokus pada skala proyek, melainkan di tingkat kota. Pertanyaan yang muncul ditengah jalan adalah apakah sebaiknya *Symbio-City* ini dimainkan di level kota alih-alih skala mikro project? Namun kemudian, seperti yang baru saja disampaikan, endpoint dari semua analisis tersebut, lebih tepatnya dari tahapan ke-3 sampai selesai (tahap ke-6), analisis sudah mulai mengerucut, namun skalanya memang tidak harus pada satu project. Bahkan jika dilihat dari penggunaan framework logis sebagai alat analisis yang salah satunya untuk menentukan dan menguraikan isu prioritas, pendekatan *Symbio-City* ini tepat diterapkan dengan basis satu permasalahan. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dicarikan pemecahannya, dan setelah ketemu sangat mungkin untuk di breakdown secara lebih operasional menjadi beberapa project jangka pendek. Hal ini menunjukkan kalau *Symbio-City* relevan digunakan pada skala lebih besar dari satu jenis project saja. Selanjutnya jika skala project terlalu kecil, apakah lebih tepat jika ditempatkan pada skala Kota? Beberapa tools memang memiliki scope analisis kota sehingga sangat mungkin menerapkannya di tingkat kota. Jika bermain pada level ini, tentu akan banyak analisis yang bersifat project-based sebagai antisipasi kompleksnya permasalahan pembangunan inklusif dan sustainable di tingkat kota. Sebagai alternatif, pendekatan *Symbio-City* mungkin lebih efisien jika diterapkan pada skala Meso, atau di tengah-tengah antara tingkat kota dan tingkat project. Terlepas dari itu semua, dengan demikian, apakah penerapannya dalam skala project menjadi tidak relevan? Setidaknya ada 3 pelajaran yang penulis dapatkan terkait kemungkinan terbaik untuk menerapkan pendekatan tersebut

2.4.1. Implementasi pada skala Project

Sebagaimana telah diuraikan, pendekatan *Symbio-City* ini cukup tajam dalam menganalisis isu pada skala project. Beberapa tools cukup membantu pelaksanaan slums upgrading inklusif di lokasi case study. Namun demikian, sebagaimana diuraikan diatas, terlalu banyak analisis yang dipakai untuk hanya fokus pada satu project. Untuk itu, beberapa analisis bisa ditinggalkan. Dalam hal ini, alat analisis yang disediakan *Symbio-City* merupakan menu yang sebagian bisa dipilih dan sebagian lainnya ditinggalkan. Prinsip yang dipakai adalah 6 tahapan sebagaimana diulas pada pembahasan sebelumnya. 3 tahap telah selesai dianalisis, dan dua diantaranya mengandung banyak tools, yaitu tahap 2 dan 3. Tahap 2 analisis situasi atau kondisi saat ini memiliki banyak sekali tools, mulai dari SWOT 3 faktor (lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi), sampai analisis kelembagaan. Tahap 3 penentuan isu prioritas dan tujuan jangka panjang juga memiliki beberapa alat analisis. Menjadikan tools *Symbio-City* sebagai menu berarti memilih diantara tools tersebut setidaknya satu pada setiap tahapan.

Dalam konteks slums upgrading inklusif, pemilihan alat analisis yang relevan bisa dimulai dari pembahasan **2.3. Relevansi Penerapan *Symbio-City***, sub point kedua, yaitu **2.3.2. Analisis**

yang Relevan. Alat analisis dibedakan skalanya dan keterkaitannya dengan project slums upgrading inklusif. Alat analisis yang akan digunakan setidaknya adalah yang terkait langsung dengan isu project dan dalam skala yang sama, yaitu komunitas. Alat analisis tersebut adalah (1) analisis Dimensi Keruangan, baik berupa Pola Guna Lahan maupun (2) SWOT spasial, (3) analisis Dimensi Sosial, (4) Partisipasi Masyarakat, (5) analisis GRID dan (6) analisis Logical Framework. Apakah 6 alat analisis tersebut cukup? Untuk mengujinya, masing-masing alat analisis tersebut perlu dimasukan sesuai tahapan *Symbio-City*, khususnya 2 dan 3. Alat analisis yang relevan dengan Analisis Situasi (tahap 2) adalah analisis dimensi keruangan dan dimensi sosial. Sedangkan alat yang relevan dengan penentuan isu penting dan tujuan jangka panjang adalah partisipasi masyarakat, Grid dan logical framework. Alat analisis lain menjadi pilihan-pilihan yang akan diambil jika setelah melakukan analisa dengan alat-alat analisis di atas masih dirasa kurang informasi untuk sampai pada tahap penyusunan proposal (*Symbio-City* tahap 4).

Alat analisis yang menjadi cadangan tersebut diantaranya adalah analisis yang masih terkait project namun pada skala kota, yaitu analisis stakeholder dan analisis dimensi sosial (tingkat kota). Analisis yang tidak terkait juga bisa menjadi opsi selanjutnya, terutama pada scope yang sama, yaitu analisis Sistem Perkotaan dan Jasa Ekosistem tingkat komunitas, SWOT tingkat Kota, Sistem Perkotaan, Tingkat Sustainability/ Diagram Spider, dan Jasa Ekosistem.

2.4.2. Pengembangan Database Symbio-City

Alternatif lain yang bisa diimplementasikan dari hasil analisis *Symbio-City* ini adalah dengan menjadikannya referensi bersama berbagai skema intervensi atau project pembangunan, baik dalam lingkup kota maupun komunitas. Artinya, hasil analisis yang telah dilakukan tersebut tidak berhenti penggunaannya pada project eksisting, melainkan bisa disimpan untuk suatu saat dibuka kembali sebagai bahan yang direview dan diupdate untuk menyesuaikan perubahan situasi. Secara lebih teknis, beberapa analisis yang berada pada level kota dapat disimpan database untuk intervensi-intervensi lain di masa depan sehingga efisien tidak mengulangi lagi dari nol. Analisis-analisis lain yang sifatnya lebih spesifik juga semestinya bisa dijadikan rujukan yang tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang relevan dengan kebutuhan. Temuan-temuan lapangan juga bisa menjadi referensi untuk intervensi sejenis di tempat lain, bisa dijadikan database juga sehingga nantinya tinggal mengkonfirmasi atau membandingkannya dengan temuan di tempat lain namun dalam koridor tema intervensi yang sama. Nantinya, pengguna data dalam analisis *Symbio-City* sangat open, pengguna yang harus memilih data apa yang relevan diolah dan analisis. Perlu fokus pada beberapa jenis dan tema terpilih agar bisa fokus dan lebih efisien.

Database yang dimaksud bisa dibikin secara sederhana dengan memanfaatkan Google Drive atau fasilitas penyimpanan lainya yang bisa diakses publik atau kolega secara mudah. Didalam fasilitas penyimpanan tersebut, klasifikasi perlu dilakukan mengikuti sistematika tahapan *Symbio-City*, berdasarkan scope analisis, dan kelompok isu yang sudah dikerjakan. Aspek pengelolannya juga perlu dipastikan keberlanjutannya, tidak berhenti pada orang perseorangan sehingga jika orang tersebut pindah atau berhenti dari pekerjaan, data akan ikut terbawa. Alternatifnya adalah dengan membangun sistem pengelolaan dimana prosedur operasi standar sekaligus *person in charge* ditetapkan secara jelas dan resmi. Pada akhirnya nanti, jika hasil-hasil analisis, informasi dan case-case sudah terakumulasi secara masif, pemanfaatannya tidak hanya sebatas pada pendekatan *Symbio-City* sebagai rujukan, melainkan sumber data yang bermanfaat dalam konteks perencanaan pembangunan secara umum, termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi.

2.4.3. Mengorganisir Project dan Mengelola Program dengan Pendekatan Symbio-City

Terakhir, pembelajaran yang kami dapatkan adalah terkait bagaimana project sebaiknya diorganisir. Adopsi *Symbio-City* pada project slums-upgrading yang sedang kami lakukan adalah benar-benar sebagai pelengkap, dan sifatnya memberi masukan kepada tim yang melaksanakan project tersebut di lapangan. Kotaku memiliki organisasi pelaksanaannya sendiri dan meskipun membutuhkan masukan dari aspek inklusi, pada akhirnya masukan tersebut bersifat sporadis. Beberapa masukan memang dipakai, namun ini tentu akan berbeda jika pendekatan *Symbio-City* ini memang benar-benar terintegrasi kedalam framework pelaksanaan project. Dalam hal ini, kondisi ideal yang bisa kami sarankan adalah analisis *Symbio-City* dilaksanakan secara terintegrasi oleh tim yang sama yang melaksanakan project.

Lebih jauh lagi, analisis *Symbio-City*, sebagaimana kami sarankan, yang ideal adalah pada level Meso, atau di tengah-tengah antara scope Kota dan project. Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis ini efisien dilakukan dalam tingkat program atau sasaran pembangunan. Suatu sasaran pembangunan bisa dicapai dengan menjalankan 1 atau lebih dari program pembangunan. Operasionalisasi kemudian di breakdown menjadi beberapa kegiatan atau project yang satu sama lain saling mendukung untuk tercapainya target program, dan pada akhirnya tercapai pada level sasaran pembangunan. Pola pengorganisasiannya juga mengikuti, yaitu - dalam konteks Pemerintah Kota- dipimpin oleh Administrator jika Program dan bahkan Pejabat Tinggi Pratama jika Sasaran Pembangunan. Dan karena analisis *Symbio-City* fleksibel bersifat Iterative, pejabat terkait tidak perlu khawatir harus mengkondisikan segala sesuatunya siap dari awal pelaksanaan. Pendekatan ini, sebagaimana secara panjang lebar kami eksplor, selalu membuka peluang untuk merevisi setiap tahap sambil intervensi tetap berjalan.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Pendekatan *Symbio-City* merupakan serangkaian alat analisis yang digunakan untuk intervensi pembangunan yang holistik dan inklusif. Implementasi pendekatan ini dilaksanakan dalam 6 tahap yang prosesnya memungkinkan untuk dilaksanakan secara bolak-balik (iteratif). Dari 6 keseluruhan tahap, analisis yang penulis lakukan saat ini sampai pada tahap 3. Namun justru banyak analisis yang dilakukan pada 3 tahap pertama ini yang pada tahap selanjutnya dituangkan dalam proposal. Rangkaian analisis dengan dilakukan dengan berbagai tools tersebut kemudian yang coba dikolaborasikan dengan Kotaku sebagai pelaksana proyek slums upgrading inklusif. Hasilnya adalah sebagian diadopsi oleh pelaksana proyek, sebagian lainnya belum diadopsi meski masih relevan, dan sebagian sisanya kurang relevan. Hal ini disebabkan banyak alat analisis yang memiliki scope yang lebih luas dibanding tingkat project di suatu komunitas. Sebagai alternatif, pendekatan *Symbio-City* akan lebih tepat jika diterapkan dalam skala *Meso*, yaitu beberapa project sekaligus yang menjawab satu permasalahan pembangunan utama dan dilaksanakan dalam jangka panjang.

Hasil studi serta upaya untuk mengimplementasikannya secara kolaboratif juga menghasilkan beberapa lesson learnt. Pertama, dalam skala project, pendekatan *Symbio-City* berfungsi sebagai 'menu' kumpulan alat analisis yang bisa dipilih yang relevan. Kedua, rangkaian analisis tersebut sangat komprehensif, meliputi baik level kota maupun komunitas/ project dan dengan jangkauan isu yang sangat luas sehingga hasil dari 'kerja keras' untuk menyelesaikannya perlu didokumentasikan sebagai database untuk berbagai keperluan pembangunan yang inklusif dan sustainable. Terakhir, analisis dengan pendekatan *Symbio-City* lebih tepat jika dilakukan oleh

organisasi pelaksana, bukan tim yang terpisah sebagaimana basis dari studi kasus dalam paper ini. Dengan pola demikian, mekanisme analisis terintegrasi dalam ritme kerja tim dan pemanfaatan hasilnya juga bisa lebih maksimal.

3.2. Rekomendasi Kebijakan

Studi ini pertama-tama berfokus pada isu slums upgrading inklusif. Beberapa analisis sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam skema penanganan slums tersebut. Stakeholder yang dilibatkan perlu diperluas mencakup kelompok rentan dan organisasi yang merepresentasinya. Sebagai bagian dari analisis situasi, isu-isu sosial yang mencakup permasalahan kerentanan juga perlu diidentifikasi, meliputi tapi tidak terbatas pada kemiskinan, ragam dan tingkat disabilitas, meningkatnya jumlah lansia, permasalahan dan kebutuhan anak, terutama di masa pandemi dan sejenisnya. Jika diperlukan, analisis isu sosial tingkat kota perlu dilakukan untuk melihat konteks yang lebih luas sekaligus mengatasi kurangnya data terkait pada skala lokal. Partisipasi masyarakat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, potensi yang dimiliki dan mimpi bersama atau visi komunitas serta alternatif pemecahan masalah yang lebih konkret. Identifikasi potensi dan masalah tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks spasial, berupa mengenali pola guna lahan serta kekuatan - kelemahan - kesempatan dan ancaman dengan kondisi spasial tersebut.

Analisis *Symbio-City* lebih tepat jika diimplementasi di atas skala project tunggal, yaitu program atau sasaran strategis daerah. Stakeholder yang paling berkepentingan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota. Basis analisis yang dipakai bertolak pada suatu permasalahan besar pembangunan, misalkan kemiskinan atau *backlog*. Rangkaian analisis yang dilakukan selanjutnya adalah dalam rangka mengidentifikasi stakeholder, menganalisis situasi dan menentukan isu-isu penting yang diturunkan dari permasalahan tersebut. Rekomendasi atau luaran dari analisis ini nantinya yang dipakai sebagai basis penyusunan beberapa intervensi di tingkat kegiatan atau project yang saling bersinergi untuk memecahkan satu permasalahan besar tersebut. Dalam hal ini, hasil analisis *Symbio-City* juga perlu didokumentasikan untuk bisa dimanfaatkan pada analisis isu yang berbeda di kemudian hari. Pendokumentasiannya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, sebagai database yang mudah diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.

Daftar Pustaka

- Andersson G., Roux J. & Ordbidarna. (2014). *Symbio-City process guide, insearch of synergies for sustainable cities*. SKL International
- Chaerul M, Tanaka M, Ashok V. Shekdar AV. (2007). *Municipal Solid Waste Management in Indonesia: Status And the Strategic Actions*. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University Vo1.12, No,I, pp.41-49.
- Comino, E. dan Ferretti, V. (2016). *Indicators-based spatial SWOT analysis: supporting the strategic planning and management of complex territorial systems*. Ecological Indicators, 60. pp. 1104-1117. ISSN 1470-160X
- Kamim, A.B.M., Amal, I., dan Khandiq, M.R. (2019). *Problematika perumahan perkotaan di kota Yogyakarta*, jurnal sosiologi USK, Vol. 13 No. 1, Juni 2019

- Kuran, C., Kruke, B.I., dan Torpan, S. (2020). *Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective*. International Journal of Disaster Risk Reduction 50 (2020)
- Masruroh, F., Maulani L., dan Anisa. (2021). *Kajian prinsip universal design yang mengakomodasi aksesibilitas difabel studi kasus taman Menteng*, dalam journal fakultas teknik universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses 9 Juli 2021, journal.ftumj.ac.id/index.php/semnastek
- Neuwirth, R. (2005). *Shadow cities: a billion squatters, a new urban world*. New York: Routledge
- Pratama, A. dan Jamil, M.H. (2020). *The kotaku: study of the national slum upgrading program sustainability in coastal areas*, dalam Russian journal of agricultural and economic sciences, November 2020
- Prayitno, B. (2017). *Cohabitation space: a model for urban informal settlement consolidation for the heritage city of Yogyakarta, Indonesia*, Journal of Asian Architecture and Building Engineering/ September 2017/ 534
- Raharjo, W. (2010). *Becoming prosperous: informal urbanism in Yogyakarta* dalam Dovey, K. (2010) *Becoming places: urbanism/ architecture/ identity/ power*. London: Routledge
- Ranhagen, U. & Groth, A. (2012). *Symbio-City approach, a conceptual framework for sustainable urban development*. SKL International
- Soto, H.D. (1989). *The other path: the invisible revolution in the third world*. New York: HarperCollins
- UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction* (2009)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh